

**ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR SELAMA MASA COVID 19 PADA  
KANTOR SAMSAT MEDAN SELATAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : RAHMAH SYAKILA

NPM : 1705170113

Program Studi : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri Ba No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama Lengkap : RAHMAH SYAKILA  
N.P.M : 1705170113  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SELAMA MASA COVID-19 PADA KANTOR SAMSAT-MEDAN SELATAN  
Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

Penguji I

Dr. MAYA SARI SE., M.Si., AK

Penguji II

SURYA SANJAYA SE., MM

Pembimbing

Dr. SYAFRIDA HANI, SE., M. Si

TIM PENGUJI

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.



Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA LENGKAP : RAHMAH SYAKILA  
NPM : 1705170113  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR SELAMA MASA COVID-  
19 PADA KANTOR SAMSAT MEDAN SELATAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2021

Pembimbing Skripsi

(Dr. SYAFRIDA HANI, SE., M. Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)



(H. IANURI, S.E., M.M., M.Si)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Jl. Kapten Muhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238**

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Rahmah Syakila  
NPM : 1705170113  
Dosen Pembimbing : Dr. Syafrida Hani, S.E., M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi  
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Selama  
Masa Covid-19 pada Kantor SAMSAT Medan Selatan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Latar Belakang Masalah diperbaiki	10 / 9 2021	
Bab 2	- Teori dilengkapi masing - masing trap variabel - Kerangka konseptual diperbaiki	10 / 9 2021	
Bab 3	- Teknik Pengambilan Sampel.	10 / 9 2021	
Bab 4	Pembahasan disesuaikan dengan hasil penelitian trap variabel.	13 / 9 2021	
Bab 5	Kesimpulan disesuaikan dengan hasil dari Bab IV	17 / 9 2021	
Daftar Pustaka	baik dengan Mendeley	17 / 9 2021	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc Sidang		

Diketahui Oleh :  
Ketua Program Studi

(Dr. ZULIA HANUM, S.E, M.Si)

Medan, September 2021  
Disetujui Oleh :  
Dosen Pembimbing

(Dr. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAH SYAKILA  
NPM : 1705170113  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Skripsi : Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Covid- 19 Pada Kantor SAMSAT Medan Selatan

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data – data laporan keuangan dalam skripsi dan data – data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data – data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,



**RAHMAH SYAKILA**

ABSTRAK  
**ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SELAMA  
MASA COVID 19 PADA KANTOR SAMSAT MEDAN SELATAN**

**RAHMAH SYAKILA**  
**Program Studi Akuntansi**  
**E-mail:**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Covid 19 Pada Kantor Samsat Medan Selatan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 100 wajib pajak. Sedangkan sampel yang diambil berjumlah 100 wajib pajak dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat penghasilan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian secara bersama-sama tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

**Kata Kunci: Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan  
Kepatuhan Wajib Pajak**

**ABSTRACT**

***THE ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING  
MOTOR VEHICLE TAXES DURING THE COVID 19 PERIOD AT THE SOUTH***

***MEDAN SAMSAT OFFICE***

***RAHMAH SYAKILA***

***Accounting Study Program***

***E-mail:***

*This study was conducted to determine the Analysis of Factors Affecting Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes During the Covid 19 Period at the South Medan Samsat Office. The population used in this study amounted to 100 taxpayers. While the sample taken amounted to 100 taxpayers by using the sampling technique used is total sampling. This research uses quantitative research. The results of the research conducted indicate that income levels have a negative and significant effect on taxpayer compliance, tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance, tax service services have a negative and insignificant effect on taxpayer compliance. Then together the level of income, knowledge of taxation, and service of the tax authorities affect taxpayer compliance*

*Keywords: Income Level, Tax Knowledge, Fiscus Service, and Taxpayer Compliance*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Syukur alhamdulillah atas rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi proposal ini guna melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun judul skripsi saya adalah Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Kendaraan Bermotor Selama Masa Covid-19 Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan.

Dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini, penulisan telah banyak bimbingan moral maupun materi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih setulusnya dan sebesar-besarnya kepada yang teristimewa Ayahanda **M.R. Syamsiruddin Ginting** dan Ibunda tercinta **Reda Tofan Syafrilla** yang telah membantu penulis baik bantuan moral maupun materil serta jerih payah mengasuh dan mendidik, kasih sayang do'a restu, nasehat dan pengorbanan yang tidak ternilai sangat besar pengaruhnya bagi keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini. Dan tak terlupakan Adik tercinta Putri Nadila yang telah memberikan support yang sangat besar.

Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berperan, membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Dr. Agussani M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri SE, MM, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Ade Gunawan SE, M.Si** selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung SE, M.Si** selaku Wakil Dekan 3 Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Fitriani Saragih SE, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Zulia Hanum SE, M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Syafrida Hani SE, M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk revisi skripsi sekaligus memberikan bimbingannya terhadap skripsi yang akan diperbaiki untuk lebih baik lagi.
8. Bapak, ibu dosen yang telah berusaha payah memberikan pemahaman ilmu untuk diaplikasikan kepeserta didik kelak serta seluruh staf biro administrasi FEB UMSU.
9. Kepada seluruh karyawan SAMSAT Medan Selatan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis selama penelitian.

10. Seluruh Responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam pengisian kuesioner.

11. Mufachri Sandra Siregar yang telah menemani, banyak membantu, memberi semangat dan motivasi dan tukar informasi selama penyelesaian proposal skripsi ini.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Terakhir kepada sahabat-sahabat semua yang seperjuangan kelas C Akuntansi Pagi stambuk 2017 dalam membina ilmu di FEB UMSU, Semoga Allah SWT tidak bosan memberi kita kenikmatan rahmat dan hidayahnya sehingga kita menjadi golongan orang-orang beruntung.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi penulis sendiri.

*Billahi Fii Sabilil Haq Fastabiqul Khairat*

Wassallammu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Medan , Oktober 2021

**RAHMAH SYAKILA**

1705170113

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Identifikasi Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>1.3 Batasan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>1.4 Rumusan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>1.5 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>1.6 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>11</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	<b>12</b>
<b>2.1.1 Pajak</b> .....	<b>12</b>
<b>2.1.1.1 Pengertian Pajak</b> .....	<b>12</b>
<b>2.1.1.2 Ciri – Ciri Pajak</b> .....	<b>13</b>
<b>2.1.1.3 Jenis Pajak</b> .....	<b>13</b>
<b>2.1.1.4 Fungsi Pajak</b> .....	<b>14</b>
<b>2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak</b> .....	<b>16</b>
<b>2.1.2 Pajak Kendaraan Bermotor</b> .....	<b>17</b>
<b>2.1.2.1 . Definisi Pajak Kendaraan Bermotor</b> .....	<b>17</b>
<b>2.1.2.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor</b> .....	<b>18</b>
<b>2.1.2.3 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor</b> .....	<b>18</b>
<b>2.1.2.4 Dasar Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor</b> .....	<b>20</b>
<b>2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak</b> .....	<b>21</b>
<b>2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak</b> .....	<b>21</b>
<b>2.1.3.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak</b> .....	<b>22</b>
<b>2.1.3.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak</b> .....	<b>24</b>
<b>2.1.4 Tingkat Penghasilan Wajib Pajak</b> .....	<b>25</b>
<b>2.1.4.1 Pengertian Penghasilan</b> .....	<b>25</b>
<b>2.1.4.2 Golongan Penghasilan</b> .....	<b>26</b>
<b>2.1.5 Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Perpajakan</b> .....	<b>27</b>
<b>2.1.6 Tingkat Pelayanan Fiskus</b> .....	<b>27</b>
<b>2.2 Kerangka Berpikir Konseptual</b> .....	<b>28</b>
<b>2.3 Hipotesis</b> .....	<b>30</b>
<b>BAB III</b> .....	<b>31</b>

<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>31</b>
<b>3.2 Definisi Operasional .....</b>	<b>32</b>
<b>3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>33</b>
<b>3.1.1 Tempat Penelitian ini dilakukan pada Kntor SAMSAT Medan Selatan dijalan Sisingamangaraja KM 56, Sitirejo III, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. ....</b>	<b>33</b>
<b>3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....</b>	<b>34</b>
<b>3.4.1 Populasi Penelitian .....</b>	<b>35</b>
<b>3.4.2 Sampel Penelitian .....</b>	<b>36</b>
<b>3.5 Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>37</b>
<b>3.6 Teknik Analisis Data.....</b>	<b>38</b>
<b>3.6.1 Statistik Deskriptif .....</b>	<b>38</b>
<b>3.6.2 Analisis Regresi Liner Berganda .....</b>	<b>40</b>
<b>3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....</b>	<b>41</b>
<b>3.6.3.1 Uji Normalitas Data .....</b>	<b>42</b>
<b>3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas.....</b>	<b>43</b>
<b>3.6.3.3 Uji Multikolinearitas .....</b>	<b>43</b>
<b>3.6.4 Uji Hipotesis.....</b>	<b>46</b>
<b>3.6.4.1 Uji T ( Parsial) .....</b>	<b>48</b>
<b>3.6.4.2 Uji F .....</b>	<b>49</b>
<b>3.6.4.3 Koefisien Determinasi (<math>R^2</math>) .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>46</b>
<b>Hasil Penelitian dan Pembahasan.....</b>	<b>46</b>
<b>4.1 Deskripsi Data.....</b>	<b>46</b>
<b>4.2 Penyajian Data .....</b>	<b>47</b>
<b>4.2.1 Presentase Jawaban Responden Variabel tingkat Penghasilan .....</b>	<b>48</b>
<b>4.2.2 Presentase Jawaban Responden Variabel Pengatahuan Perpajakan .....</b>	<b>48</b>
<b>4.2.3 Presentase Jawaban Responden Variabel Pelayana Fiskus .....</b>	<b>49</b>
<b>4.2.4 Presentase Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....</b>	<b>49</b>
<b>4.3 Analisis Data .....</b>	<b>50</b>
<b>4.3.1 Uji Kualitas Data .....</b>	<b>50</b>
<b>4.3.1.1 Uji Validitas.....</b>	<b>50</b>
<b>4.3.2 Uji Asumsi Klasik .....</b>	<b>53</b>
<b>4.3.2.1 Uji Normalitas .....</b>	<b>53</b>
<b>4.3.2.2 Uji Multikolinearitas .....</b>	<b>54</b>
<b>4.3.2.3 Uji Heterokedasitas .....</b>	<b>54</b>
<b>4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda .....</b>	<b>55</b>
<b>4.3.4 Uji Hipotesis.....</b>	<b>57</b>
<b>4.3.4.1 Uji t Hitung ( Parsial ).....</b>	<b>57</b>

4.3.5	Koefisien Determinasi .....	59
4.4	Interprestasi Hasil Analisis Data .....	59
<b>BAB V</b>	.....	<b>62</b>
<b>Kesimpulan &amp; Saran</b>	.....	<b>62</b>
5.1	Kesimpulan .....	62
5.2	Saran .....	62

## DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Tercatat Dikantor SAMSAT Medan Selatan.....	3
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Medan Selatan .....	4
3.1 Definisi Operasional Variabel X .....	32
3.2 Definisi Operasional Variabel Terikat (Y).....	34
3.3 Waktu dan Penelitian .....	36
4.1 Persentase Jawaban Responden Tingkat Penghasilan .....	46
4.2 Persentase Jawaban Responden Pengetahuan Perpajakan .....	47
4.3 Persentase Jawaban Responden Pelayanan Fiskus .....	48
4.4 Persentase Jawaban Responden Variabel Kepatuhan WP .....	49
4.5 Hasil Uji Validitas Tingkat Penghasilan .....	50
4.6 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan .....	51
4.7 Hasil Uji Validitas Pelayanan Fiskus .....	51
4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	52
4.9 Hasil Uji Validitas Relibilitas .....	52
4.10 Hasil Uji Multikolinieritas .....	54
4.11 Analisis Regresi Linear Berganda .....	55
4.12 Hasil Uji t Hitung .....	56
4.13 Hasil Uji F Hitung .....	58
4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	59

## DAFTAR GAMBAR

<b>2.1 Kerangka Konseptual .....</b>	<b>10</b>
<b>4.1 Hasil Uji Normalitas .....</b>	<b>53</b>
<b>4.2 Hasil Uji Heterokodisitas .....</b>	<b>55</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Munculnya wabah baru yang bernama Covid - 19 menjadi suatu permasalahan global bagi seluruh negara, tak terkecuali Indonesia. Virus yang menyerang sistem pernafasan dan sistem kekebalan tubuh ini menjadi masalah yang baru bagi dunia. Perkembangan kasus COVID-19 berawal di Wuhan pada tanggal 30 Desember 2019 dimana Wuhan Municipal Health Committee yang mengeluarkan pernyataan “urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause”. Penyebaran virus yang begitu cepat membuat semua aktivitas masyarakat terhambat, baik kalangan menengah ke bawah dan menengah ke atas bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang mengkonfirmasi terkena virus Corona. Indonesia merupakan salah satu negara yang terjangkit Covid-19 dengan kasus pertama terjadi pada tanggal 2 Maret 2020 hingga data terakhir 13 Maret 2021 sebanyak 1.414. 741 terkonfirmasi positif Covid-19 (Gloria, 14 Maret 2021 , [www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Penyebaran virus Covid 19 yang menular ke banyak negara sangat berdampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi , pariwisata , pendidikan dan ekonomi. Saat ini perekonomian di Indonesia sedang mengalami penyusutan dikarenakan banyaknya usaha-usaha yang tutup karena sepi pengunjung dan pekerja yang mengalami PHK karena pemilik usaha tidak mampu menggaji dan memilih untuk merumahkan sementara waktu para pegawainya. Peningkatan jumlah kasus yang cepat perharinya di Indonesia mengharuskan pemerintah Indonesia mulai membuat kebijakan baru agar dapat menurunkan tingkat penularan Covid-19.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan *social distancing* dan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dan saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai mengikuti dan mematuhi perintah yang diberikan pemerintah meskipun masih banyak orang-orang yang belum bisa mematuhi, disebabkan beberapa alasan. Akan tetapi dari kebijakan tersebut dan akibat dari pandemi virus ini muncul permasalahan yang sulit dari semua kalangan, Sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga sulitnya mendapatkan pendapatan yang seimbang.

Pertumbuhan perekonomian mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19. Menteri keuangan Sri Mulyani memperkirakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 2,3% karena virus corona, namun kondisi terburuk yang terjadi ekonomi Indonesia akan minus hingga 0,4% (Makki, 1 April 2020, [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)). Pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama dalam menompang pembiayaan pembangunan nasional. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar kewajiban pajaknya.

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dan berpengaruh, serta memiliki peran dan semakin diandalkan dalam kepentingan pembangunan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Undang-undang perpajakan Indonesia sejak tahun 1984 menganut sistem Self Assessment yang memberi “kepercayaan penuh” kepada wajib pajak (WP) untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Mardiasmo, 2006:7). Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan.

Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri menjadi sangat berpengaruh dan dominan, Namun hal ini belum bisa dikatakan sebagai optimal jika dilihat masih banyak nya masyarakat yang belum menjadi wajib pajak yang patuh karena kurangnya kesadaran dari setiap individu. Salah satu sumber pendapatan daerah yaitu dari Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB). Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraannya di jalan umum. Menurut UU Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 defenisi pajak kendaraan bermotor sebagai berikut: “Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis Pajak Provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah (Yunus, 2010).

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor yang Tercatat di Kantor SAMSAT Medan Selatan Tahun 2019-2021**

No	Jenis Kendaraan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sedan	327	488	676	755	2.747
2	JEEP	283	439	645	1.022	6.293
3	Mini Bus	1536	1.874	3.579	6.792	44.756
4	Micro Bus	13	10	24	28	145
5	Bus	79	70	74	191	537
6	Pick Up	763	798	1184	1559	6194
7	Light Truck	12	22	24	21	110
8	Truck	311	483	483	742	5333
9	Roda Dua	24316	22360	30.404	44.012	119.040
10	Roda tiga	143	52	60	98	276
<b>Jumlah Unit</b>		27.783	26.465	37.149	55.230	185.452

*Sumber : Kantor Bersama SAMSAT Medan Selatan, 2021*

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Kantor SAMSAT Medan Selatan dari tahun 2019 – 2021 mengalami peningkatan. Menurut

Siswanto Putri (2013) ada beberapa faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Antara lain, Minat daya beli masyarakat yang tinggi, kebutuhan masyarakat terhadap transportasi yang semakin meningkat dan kemudahan untuk membeli kendaraan itu sendiri.

Setiap tahun jumlah penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari kendaraan umum yang ada dalam menjalankan aktivitas sehari – hari. Mengingat tidak sedikit juga masyarakat yang memiliki jumlah kendaraan bermotor lebih dari satu. Oleh sebab itu, maka pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Medan khususnya pada Kantor Samsat Medan Selatan harus dapat dioptimalkan sedemikian mungkin, agar terlaksannya penerimaan pajak daerah yang baik pula.

Dalam membangun pertumbuhan daerah yang baik, maka pemerintah perlu membuat kebijakan – kebijakan agar para wajib pajak bisa patuh untuk membayar pajak. Sehingga target penerimaan pajak setiap tahunnya bisa tercapai

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Medan Selatan**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
2017	210.464.807.508	230.943.225.556	109,73
2018	220.357.036.445	235.098.870.147	106,69
2019	223.900.569.243	227.130.749.050	101,44
2020	231.619.850.037	249.689.681.069	107,80
April 2021	231.619.850.037	72.832.331.922	31,44

Berdasarkan tabel 1.2 untuk realisasi dari tahun 2017, 2018 dan 2019 terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan pada 2020 mengalami kenaikan menjadi 107,80 %. Dan pada bulan april 2021 masih mengalami proses tahun berjalan. Hal ini disebabkan karena banyak hal, salah satunya masih kurangnya kepatuhan membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Rahmat Saleh (2004: 2) menyatakan bahwa teori kepatuhan telah secara signifikan diteliti melalui kajian ilmu sosial khususnya bidang psikologis dan sosiologi, dimana kedua ilmu tersebut lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan individu. Faktor- Faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan ( Vivi Yulian Sari dan Neri Susanti, 2013). Apabila faktor – faktor tersebut dapat diterapkan didalam lingkungan perpajakan, maka akan sangat membantu tingkat penerimaan pajak daerah.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini dikemukakan oleh Sapriadi ( 2013) dan Setiawan (2014) . Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat. Hal ini tentu sejalan dengan penelitian Suardana (2014) bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pentingnya suatu kesadaran yang muncul dari wajib pajak sangat membawa dampak yang sangat baik , mengingat sangat berpengaruhnya kontribusi pajak dalam membangun suatu negara ataupun

daerah. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak (Hardiningsih, 2011 dalam Ummah, 2015) .

Meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia setiap tahunnya, jika wajib pajak tidak memiliki kesadaran dan kemauan dalam membayar pajak tentu akan membuat kesenjangan dan tunggakan denda yang berakibat tidak optimalnya pendapatan pajak daerah sehingga membuat pembangunan daerah tidak berjalan lancar.

Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribusi menyebabkan perilaku (Oktaviani *et al*, 2017). Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal ataupun eksternal yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Nisa & Umar, 2019).

Teori atribusi dalam penelitian ini relevan untuk dijadikan teori pendukung karena teori atribusi menjelaskan tingkah laku wajib pajak. yang disebabkan oleh atribusi internal (tingkat pendapatan masing-masing wajib pajak, tingkat pendidikan dan kesadaran wajib pajak) dan atribusi eksternal (kualitas pelayanan) yang merubah sikap seseorang, yaitu sikap untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap ( SAMSAT ) Medan Selatan adalah tempat bagi para wajib pajak untuk membayar segala kewajiban pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya. Oleh sebab itu, sudah semestinya untuk Kantor SAMSAT Medan Selatan memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada para wajib pajak agar mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Perasaan senang dan puas yang didapati oleh wajib pajak dipercayai akan memberikan peluang yang baik untuk

meningkatkan kepatuhan membayar pajak, Sehingga akan menambah pendapat asli daerah.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah tingkat pendidikan. Hal ini juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki setiap wajib pajak maka akan memudahkan bagi wajib pajak untuk memahami ketentuan – ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Masih banyaknya wajib pajak yang memiliki pekerjaan lepas yang tidak patuh pajak juga merupakan cerminan dari rendahnya tingkat pendidikan, yang mengakibatkan kurangnya tingkat pemahaman mereka mengenai ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Faktor penghasilan dijadikan sebagai salah satu alasan wajib pajak tidak patuh akan kewajibannya . Seperti yang diungkapkan oleh nurmanto (2003: 149), bila seseorang bekerja dan menghasilkan uang, maka secara alamiah uang tersebut pertama tama ditujukannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Jika wajib pajak sudah memiliki penghasilan yang besar, dengan hal itu membuat terpenuhnya kebutuhan pribadi, sehingga wajib pajak berpeluang untuk memenuhi kewajibannya terhadap pajak. Namun , Hal ini akan menimbulkan konflik sendiri bagi wajib pajak antara kepentingan pribadi dan negara mengingat semakin sulitnya masyarakat dalam mencari pemasukan di masa pandemi covid - 19. Sehingga akan membuat semakin banyaknya wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajibannya.

Salah satu hal diataslah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian dengan judul “ **faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor selama masa covid 19 ( Studi kasus : Pada Kantor SAMSAT Medan Selatan )** “

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kantor Samsat Medan Selatan
3. Realisasi penerimaan pajak kendaran bermotor di kantor SAMSAT Medan selatan yang efektifitasnya tidak stabil.

### **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah perlu dilakukan guna memperoleh kedalaman kajian untuk menghindari perluasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam hal ini adalah Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti : Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus. Dan juga, dikarenakan keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, maka penulis hanya terfokus kepada wajib pajak kendaraan beroda 2 ( Motor) dan Mobil Pribadi.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Apakah pandemi Covid – 19 memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan selama masa pandemi Covid – 19 pada Kantor SAMSAT Medan Selatan.
- b. Apakah tingkat penghasilan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor selama masa pandemi Covid- 19.
- c. Apakah pengetahuan terhadap perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor selama masa pandemi Covid- 19.

- d. Apakah pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor selama masa pandemi Covid-19

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk Mengetahui dan Menganalisis pengaruh Covid- 19 ini terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- b. Untuk Mengetahui dan Menganalisis pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor selama masa pandemi Covid- 19.
- c. Untuk Mengetahui dan Menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor selama masa pandemi Covid- 19.
- d. Untuk Mengetahui dan Menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor selama masa pandemi Covid- 19.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Apabila penelitian ini disampaikan atau dibaca oleh yang bersangkutan, diharapkan dapat memberikan informasi baik secara teoritis maupun praktisi sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian di harapkan mampu meningkatkan dan memperluas wawasan pengetahuan dalam bidang perpajakan.

- b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan saran untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi dan menjadi masukan bagi perusahaan dalam

memungut pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan melakukan pendataan secara berkala terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi suatu pedoman dan menjadi sumbangan pemikiran atau referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli yang mempunyai maksud dan tujuan pada satu titik yaitu merumuskan pengertian pajak agar udah dimengerti dan dipahami. Di bawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut :

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dan dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Menurut Sugianto, Pajak merupakan suatu pungutan atau iuran wajib pajak yang dilakukan oleh individu atau badan kepada suatu daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang, dapat untuk dipaksakan dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yang kemudian digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah serta untuk pembangunan daerah.

Menurut Waluyo (2008:2): "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirujuk, dan yang gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Dari beberapa pendapat menurut para ahli diatas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah iuran yang dipungut oleh negara yang bersifat memaksa dan diatur berdasarkan undang – undang untuk kepentingan dan keperluan negara yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung.

#### **2.1.1.2 Ciri – Ciri Pajak**

Dari beberapa defenisi mengenai pajak yang telah dikemukakan beberapa ahli, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak menurut Mohammad Zain (2007;12) sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang – Undang serta aturan aturan pelaksanaanya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (Wajib Pajak membayar Pajak) ke sektor negara ( pemungut pajak / administrasi pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individu oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak.
5. Selain fungsi budgetair (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutupi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial ( fungsi mengatur/ regulierend).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2008:1), ciri-ciri pajak sebagai berikut:

- 1) Iuran rakyat kepada Negara
- 2) Berdasarkan Undang-Undang
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung ditujukan.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri – ciri pajak yaitu :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang – Undang yang berlaku
- 2) Pajak tidak menimbulkan adanya kontraprestasi dalam pemerintah secara langsung.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak memiliki peran untuk mengatur anggaran pemerintahan.

### **2.1.1.3 Jenis Pajak**

Menurut Dr. Bastari, Januri dkk (2015,hal.3) mengemukakan bahwa jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga macam:

#### 1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada pihak lainn tau orang lain.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Cukai, Bea Impor, dan Ekspor.

#### 2. Menurut Lembaga Sifatnya

a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pemungutannya berdasar atas subjeknya (orangnya). Dimana keadaan diri pajak dapat mempengaruhi jumlah wajib yang harus dibayar.

Contohnya: Pajak penghasilan dan pajak kekayaan.

b. Pajak Objektif adalah pajak yang pemungutannya berdasar atas objeknya

Contohnya: Pajak kekayaan, Bea masuk, bea materai, pajak impor, pajak bermotor, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya.

### 3. Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Negara (Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat yang pemungutannya di daerah dilakukan oleh kantor pelayanan pajak, Dirjen Pajak, maupun Ditjen Bea dan Cukai.

Contohnya: Pajak penghasilan, bea materai, bea perolehan hak atas bangunan, pajak migas, pajak ekspor.

b. Pajak daerah (Lokal), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, baik dilakukan oleh Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II.

Contohnya: pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak tontonan, pajak radio, pajak hiburan, pajak hotel dan pajak restoran.

#### **2.1.1.4 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara, karena pajak adalah salah satu penerimaan negara yang memiliki peran dalam membantu negara untuk membangun dan menjalankan pemerintahan. Adapun fungsi pajak menurut Erly Suandy (2013, hal. 12) sebagai berikut:

1. Fungsi financial (budgeter) memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara.

2. Fungsi mengatur, (regulerend) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.
3. Fungsi menanggung inflasi
4. Fungsi sebagai retribusi pendapatan.

#### **2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:7), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut yaitu:

- 1) Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- 2) Self Assessment System merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- 3) Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### **2.1.2 Pajak Kendaraan Bermotor**

#### **2.1.2.1 . Definisi Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Undang - Undang No 28 Tahun 2009 no 12 dan 13 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, biasa yang disebut dengan PKB adalah pajak terhadap kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor baik beroda dua atau lebih yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor

atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yg bersangkutan, termasuk juga alat alat besar yang bisa bergerak.

#### **2.1.2.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Undang - Undang no 28 tahun 2009 Pasal 3 ayat 1, Objek kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Sehingga yang termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Ada beberapa Pengecualian Objek Pajak. Hal-hal yang dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor, antara lain:

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

#### **2.1.2.3 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa yang menjadi subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

#### **2.1.2.4 Dasar Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor**

##### 1) Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor merupakan hasil dari 2 (dua) perkalian unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor yang dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu) Bobot. Yang mana maksud dari koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi dan koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

##### 2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat 1 mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi. Dengan demikian, kepastian penetapan tarif tersebut diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi. Namun jika dilihat didalam UU No 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa :

- a) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen) dan untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

b) Tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

c) Pajak Bahan Kendaraan Bermotor setinggi-tingginya 10%.

### 3) Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Cara menghitung Besarnya Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang dilakukan dengan mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Rumus penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor umumnya:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{N J K B} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

## 2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

### 2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Sedangkan menurut Hasibuan (2013:5), menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kepatuhan yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Sehingga wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

d) Menurut Simon James *et al* (n.d.) yang dikutip oleh Gunadi (2005), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik

hukum maupun administrasi. Nurmantu, 2003 (dalam Santoso, 2008) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Adapun pendapat lain tentang kepatuhan wajib pajak menurut Mohammad Zain (2008:13) adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadarannya pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”
- e. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
- f. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Jadi bisa disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka untuk memberikan kontribusi secara langsung bagi pembangunan negara ini yang di dalam pemenuhanya diberikan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di

mana prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.

### **2.1.3.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Adapun jenis – jenis kepatuhan wajib pajak adalah:

- 1). Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang undang perpajakan.
- 2). Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

### **2.1.3.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Kriteria wajib pajak yang patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 adalah sebagai berikut.

- 1). Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2). Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3). Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4). Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap pajak dan tidak berturut-turut.

Kepatuhan yang dikatakan oleh Norman D. Nowak merupakan “suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi (Devano, 2006 dalam Supadmi, 2010) sebagai berikut.

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
- d. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan peraturan perundangan perpajakan adalah meningkatnya tingkat pemahaman wajib pajak akan hak dan kewajibannya sehingga tingkat kepatuhan membayar pajak juga akan meningkat dan penghimpunan dana lewat pajak bagi penyelenggara pemerintahan dan kenegaraan dapat lebih optimal. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan perpajakan beserta sistem dan prosedurnya kepada masyarakat (Hani.S, 2010).

#### **2.1.4 Tingkat Penghasilan Wajib Pajak**

##### **2.1.4.1 Pengertian Penghasilan**

Dalam kamus Ekonomi, penghasilan adalah uang yang diterima seseorang dalam perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba dan lain sebagainya, bersama dengan tunjangan pengangguran, uang pensiun dan lain sebagainya. Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1, Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Inonesia,

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- 1). Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- 2). Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- 3). Laba usaha
- 4). Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a). Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
  - b). Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
  - c). Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
  - d). Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak - pihak yang bersangkutan.

- e). Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5). Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- 6). Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7). Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 8). Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- 9). Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- 10). Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- 11). Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- 12). Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- 13). Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- 14). Premi asuransi
- 15). Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- 16). Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- 17). Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- 18). Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

19). Surplus Bank Indonesia.

#### **2.1.4.2 Golongan Penghasilan**

Para perintis ilmu ekonomi, membagi masyarakat atas tiga kategori, yaitu kaum pekerja (dan petani), para pengusaha atau kapitalis (kelas menengah) dan para tuan tanah. Dilihat dari ekonomi dalam masyarakat terdiri dari tiga lapis, yaitu:

- 1) Lapisan ekonomi mampu atau kaya, terdiri dari para pejabat, pemerintah setempat, para dokter, insinyur, dan kelompok finansial lainnya.
- 2) Lapisan ekonomi menengah, yang terdiri dari alim ulama dan pegawai.
- 3) Lapisan ekonomi miskin, yang terdiri dari buruh, para petani, buruh bangunan, buruh pabrik, dan buruh-buruh sejenis yang tidak tetap.

#### **2.1.5 Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Perpajakan**

Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Hardiningsih, 2011). Proses merubah sikap dan tata laku wajib pajak atau sekelompok badan dengan cara mengajarkan atau memberikan pelatihan mengenai perpajakan.

Pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan biasanya didapatkan oleh para wajib pajak melalui pendidikan ataupun penyuluhan yang diberikan oleh aparat pajak. Apabila para Wajib pajak mendapatkan pengetahuan mengenai perpajakan dan memahaminya, maka tidak menutup kemungkinan untuk Wajib Pajak patuh terhadap kewajibannya perpajakannya, dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal maka akan

diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

- a. Kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
- b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
- c. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.
- d. Pengetahuan dan Pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. Dengan memahami peraturan mengenai tarif pajak yang berlaku maka akan mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajibannya sendiri secara benar.
- e. Wajib pajak memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
- f. Wajib pajak memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti

### **2.1.6 Tingkat Pelayanan Fiskus**

Pelayanan Fiskus adalah Orang atau badan yang mempunyai tugas untuk memungut pajak atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak), yang gunanya untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, dan untuk menyelenggarakan Pemerintahan (Kesit, 2009). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.

Tingkat keberhasilan penerimaan pajak selain dipengaruhi oleh Tax Payer juga dipengaruhi oleh Tax Policy, Tax Law dan Tax Administration (Prastiantono, 1994). Ketiga faktor ini melekat dan dikendalikan oleh fiskus itu sendiri, sedangkan faktor Tax Payer didominasi dari dalam diri wajib pajak itu sendiri.

Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE -45/PJ/2007 ditegaskan bahwa pelayanan adalah sentra dan indikator utama untuk membangun citra DJP, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan wajib pajak terhadap DJP. Sehingga membuat para wajib pajak terdorong untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya,

Berdasarkan keputusan Menteri Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, ada beberapa prinsip pelayanan publik yaitu:

- a. Kesederhanaan
- b. Kejelasan
  - 1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
  - 2) Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberkan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.

- 3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran
- c. Kepastian Waktu
- d. Akurasi
- e. Keamanan
- f. Tanggung jawab
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana
- h. Kemudahan Akses
- i. Kedisiplinan, Kesopanan dan keramahan
- j. Kenyamanan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Masyarakat sangat menginginkan pelayanan yang baik dari fiskus. Sehingga masyarakat dapat patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

## **2.2 Kerangka Berpikir Konseptual**

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapat dari ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dihubungkan dengan variabel yang diteliti.

Pada penelitian ini akan dijelaskan faktor faktor apa saja yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraannya selama masa covid -19. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor. Dalam memberikan gambaran dalam kerangka konseptual pada bagian ini dapat dikembangkan sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penghasilan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang didapatkan dari dalam negeri ataupun luar negeri yang digunakan untuk kebutuhan sehari – hari. Dimana penghasilan juga merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk penambahan aset atau pengurangan liabilitas sehingga mengakibatkan kenaikan ekuitas. Apabila dikaitkan dengan pajak, maka penghasilan inilah yang dijadikan oleh wajib pajak untuk membayar kewajibannya dalam hal ini adalah pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rizalatul Husna (2014) bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Syah dan Krisdiyawati (2017) menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### 2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan pada sistem perpajakannya yaitu dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Dalam *self assesment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun di dalam kenyataannya masih banyak dijumpai wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dikarenakan salah satunya kurangnya pengetahuan

mengenai administrasi perpajakan. Pengetahuan mengenai perpajakan bisa didapatkan secara formal seperti belajar perpajakan ataupun seminar perpajakan. Selain itu bisa juga dengan secara informal, seperti penyuluhan yang dilakukan oleh aparat perpajakan dan iklan – iklan tentang pajak.

Menurut Suryadi (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun informal akan berdampak positif terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Ria Prasasti (2016) Pengetahuan tentang pajak dan kompleksitas pajak dipandang sebagai faktor yang berkontribusi terhadap sikap ketidakpatuhan pada Wajib Pajak, sehingga semakin tinggi tingkat pengetahuan mengenai perpajakan maka akan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### 3. Pengaruh Pelayanan Fiskal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya tergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas pajak kepada wajib pajak. Menurut Tjiptono (dalam Dwiasti Qodriati Budi Pertiwi, 2017), kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan wajib pajak.

Menurut Dwi Pertiwi Angraini ( 2016 ) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak . Semakin tinggi kualitas pelayanan fiskus, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Harjanti Puspa Arum (2012) dalam hasil penelitiannya juga menyatakan bahwa tingkat pelayanan fiskus bernilai positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

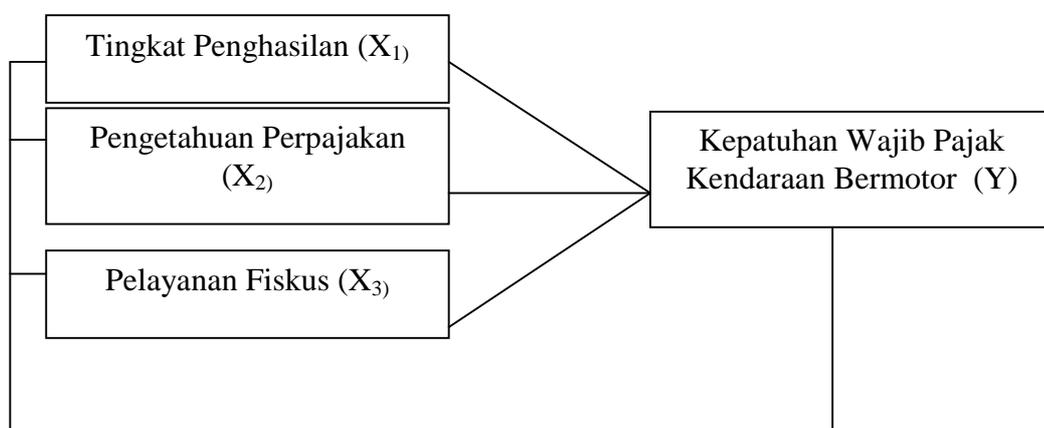
4. Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mau mengikuti atau menjalani sesuai dengan aturan yang sedang berlaku. Tingkat penghasilan merupakan salah satu faktor bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, semakin tinggi penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui oleh seorang wajib pajak mengenai peraturan apa saja dan bagaimana administrasi yang ada dalam perpajakan.

Pelayanan fiskal merupakan pelayanan publik yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak dalam memberikan pelayanan baik dari segi pemeriksaan dan juga memberikan informasi administrasi mengenai perpajakan. Sehingga pelayanan fiskal yang bermutu baik diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan melalui kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar II. 1 Kerangka Konseptual**

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis berasal dari bahasa sanskerta, yang terdiri dari kata *Hypo* dan *Thesis*. *Hypo* berarti kurang dan *Thesis* berarti pendapat. Sehingga jika di definisikan hipotesis adalah suatu penjelasan dugaan sementara dari pernyataan yang ada pada perumusan masalah penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian ini, maka dapat diambil hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa covid- 19.
2. Adanya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa covid- 19.
3. Adanya pengaruh pelayanan fiskal terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa covid- 19.
4. Adanya pengaruh tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskal terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa covid- 19 di SAMSAT Medan Selatan.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan *assosiatif*. Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih dan juga mengukur hubungan hubungan antara variabel riset, atau berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui apa saja faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa pandemi Covid 19 pada kantor Samsat Medan Timur.

Adapun topik utama yang menjadi variabel terikat adalah kepatuhan membayar pajak, sedangkan variabel bebasnya adalah tingkat penghasilan, pengaruh pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus.

### 3.2 Definisi Operasional

Defenisi operasional Menurut (Azuar Juliandi, dkk, 2015, hal. 86) mengatakan definisi oprasional bukanlah definisi/pengertian teoritis, tetapi oprasionalisasi dari variabel, berupa pengukuran atau pengujian suatu variabel. Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi operasional adalah:

**Tabel 3.1**

**Defenisi Operasional Variabel X**

Jenis Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Tingkat Penghasilan (X <sub>1</sub> )	Menurut Sodikin dan Riyono (2014:37), “Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan	1) Taat membayar pajak meskipun pendapatan rendah  2) Besar kecilnya pajak tidak menghalangi dalam membayar pajak 3) Sanggup membayar	skala <i>likert</i> dengan nilai skor 1-5

	<p>ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Faktor tingkat penghasilan menjadi hal yang sangat fundamental dalam memenuhi kewajiban. Karena pada dasarnya masyarakat yang berpenghasilan dibawah rata-rata akan memilih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dahulu dari pada kewajiban.</p>	<p><b>besarnya pajak yang dikenakan; dan</b>  <b>(4) Pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban.</b></p>	
<p>Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Perpajakan (<math>X_2</math>)</p>	<p>Menurut Hardingsih (2011) Pengetahuan Pajak adalah proses pengubahan sikap atau sekelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). Wajib pajak yang kurang paham mengenai peraturan perpajakan akan cenderung tidak patuh untuk membayar pajak.</p>	<p>1)Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap Wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.  2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak  3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.  4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP,PKP dan tarif pajak.  5) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.</p>	<p><b>skala <i>likert</i></b></p>
<p>Tingkat Pelayanan Fiskus (<math>X_3</math>)</p>	<p>Pelayanan fiskus menurut Jatmiko (2006) adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak</p>	<p>1)Bukti langsung, yaitu meliputi fasilitas fisik, pegawai, perlengkapan, dan komunikasi  2) Keadaan (<i>reliability</i>) yaitu kemampuan karyawan Kantor Bersama SAMSAT Kota</p>	<p><b>Skala <i>likert</i> dengan nilai skor 1-5.</b></p>

		<p>Denpasar dalam memberikan pelayanan yang menjanjikan dengan segera dan memuaskan</p> <p>3) Daya tanggap (<i>responsiveness</i>) merupakan karakteristik kecocokan dalam pelayanan manusia yaitu keinginan para petugas pajak untuk membantu wajib pajak dan memberikan pelayanan dengan tanggap</p> <p>(4) Jaminan (<i>assurance</i>) yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak bebas dari resiko, bahaya atau keragu-raguan; dan</p> <p>5) Empati (<i>empathy</i>) adalah kondisi mental yang membuat seseorang merasa dirinya sama dengan perasaan orang lain yang mencakup kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi wajib pajak, dan memahami kebutuhan wajib pajak.</p>	
--	--	--	--

**Tabel 3.2**  
**Definisi Operasional Variabel Terikat (Y)**

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakam menurut Safr Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan sebagai suatu	<p><b>1) Peraturan pajak kendaraan bermotor harus ditaati oleh seluruh wajib pajak</b></p> <p><b>2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas</b></p> <p><b>3) Wajib pajak membayar pajak kendaraan</b></p>	Skala Likert
---------------------------	--	---	--------------

	keadaan dimana Wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”	bermotor dalam jumlah yang sesuai dengan yang terdapat pada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan); dan 4)Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.	
--	--	---	--

## 1.1 Tempat dan Waktu Penelitian

### 1.1.1 Tempat

Penelitian ini dilakukan pada Kantor SAMSAT Medan Selatan di Jalan Sisingamangaraja KM 56, Sitirejo III, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.

### 1.1.2 Waktu

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Maret sampai dengan Agustus 2021. Adapun jadwal rencana penelitian mulai dari survey lokasi dan objek penelitian hingga penyelesaian penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

NO	Kegiatan Penelitian	April 2021				Mei 2021				Juni 2021				Juli 2021				Agustus		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Pengajuan Judul	■	■																	
2	Pengumpulan Data			■	■	■	■													
3	Pembuatan Proposal							■	■	■	■									
4	Bimbingan Proposal									■	■	■	■							
5	Seminar Proposal													■	■	■				
6	Penyusunan Skripsi															■	■	■		

7	Bimbingan Skripsi																			
8	Sidang Meja Hijau																			

**Tabel 3.3**  
**Waktu Penelitian**

### 3.4 Teknik Pengambilan Sampel

#### 3.4.1 Populasi Penelitian

Sugiyono (2012, Hal. 80) menyatakan bahwa, “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.”

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada SAMSAT Medan Selatan pada tahun 2021. Adapun jumlah populasi yang terdaftar di SAMSAT Medan Selatan adalah sebanyak 100 wajib pajak.

#### 3.4.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2016:81). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Medan Selatan. Penentuan sampel ditentukan dengan rumus slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Presentase kelonggaran kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir, misalnya 10% atau 0,01.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Observasi (Pengamatan)

Menurut Sutrisno Hadi dalam (Sugiyono, 2012) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik observasi yaitu dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dalam prose sanksi administratif pada bagian pajak kendaraan bermotor SAMSAT Medan Selatan

#### 2) Quisioner (Angket)

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Dimana data primer adalah data yaang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama dan dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data survey dan kuesioner. Metode kuesioner atau dalam bahasa Inggris disebut *questionnaire* (daftar pertanyaan). Metode berbentuk rangkaian pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, kemudian diberikan kepada responden untuk diisi. Adapun kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket langsung dan tertutup.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiono, 2008). Dimana setiap questioner memiliki opsi sebagai berikut:

**Tabel III . 2 Skala Likert**

<b>Keterangan</b>	<b>Skor</b>
<b>Sangat Setuju (SS)</b>	<b>5</b>
<b>Setuju (S)</b>	<b>4</b>
<b>Normal (N)</b>	<b>3</b>
<b>Tidak Setuju (TS)</b>	<b>2</b>
<b>Sangat Tidak Setuju (STS)</b>	<b>1</b>

Selanjutnya angket yang disusun diuji kelayakannya melalui pengujian validitas dan reliabilitas.

### **1) Uji Validitas dan Reliabilitas**

Program yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrument adalah program komputer *Statistical Program For Sosial Science* (SPSS) versi 16,00 yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas.

Menurut Azwar (1986) Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Terkandung di sini pengertian bahwa ketepatan validitas pada suatu alat ukur tergantung pada kemampuan alat ukur tersebut mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki dengan tepat. Suatu tes yang dimaksudkan untuk mengukur variabel A dan kemudian memberikan hasil pengukuran mengenai variabel A, dikatakan sebagai alat ukur yang memiliki validitas tinggi. Suatu tes yang dimaksudkan mengukur variabel A akan tetapi menghasilkan data mengenai variabel A' atau bahkan B, dikatakan sebagai alat ukur yang memiliki validitas

rendah untuk mengukur variabel A dan tinggi validitasnya untuk mengukur variabel A' atau B (Azwar 1986).

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas butir. Menurut Sugiono (2016, hal 128), untuk mengetahui apakah perbedaan itu signifikan atau tidak, maka harga *t hitung* tersebut perlu dibandingkan dengan harga *t tabel*. Bila *t hitung* lebih besar dengan *t tabel* maka perbedaan itu signifikan, sehingga instrument dinyatakan valid. Untuk mengukur validitas setiap butir pertanyaan, maka digunakan teknik korelasi *product moment*, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Sumber : Sugiyono , 2016, hal 183

Dimana :

N = Banyaknya pasangan pengamatan

$\sum X$  = Jumlah pengamatan variabel X

$\sum Y$  = Jumlah pengamatan variabel Y

$(\sum X)^2$  = Jumlah kuadrat pengamatan variabel X

$(\sum Y)^2$  = Jumlah kuadrat pengamatan variabel Y

$(\sum X)^2$  = Kuadrat jumlah pengamatan variabel X

$(\sum Y)^2$  = Kuadrat jumlah pengamatan variabel Y

$\sum XY$  = Jumlah hasil kali variabel X dan Y

Ketentuan apakah suatu butir instrument valid atau tidak adalah melihat nilai probabilitas koefisien korelasinya. Menurut Sugiono (2016, hal. 183), uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai *t hitung* dengan *t table*. Jika *t hitung* lebih besar dari *t table* nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan

valid. Dengan cara lain yaitu dilihat dari nilai *sig* (2 tailed) dan membandingkan dengan taraf signifikan ( $\alpha$ ) yang ditentukan peneliti. Bila nilai *sig* (2 tailed)  $\leq 0.05$ , maka butir instrument valid, jika nilai *sig* (2 tailed)  $\geq 0,05$ , maka butir instrument tidak valid.

### 1) Uji Reabilitas

Reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2002: 154 ). Selanjutnya untuk menguji reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha* dikatakan reliable bila hasil Alpha  $> 0,6$  dengan rumus Alpha sebagai berikut:

$$\alpha = \left( \frac{k}{k-1} \right) \left( \frac{s_r^2 - \sum Si^2}{S_x^2} \right)$$

Keterangan:

$\alpha$  = koefisien reliabilitas alpha

k = jumlah item

$\sum Si$  = Jumlah varians skor tiap- tiap item

St = Jumlah varians butir

Interval Nilai	Tingkat Reliabilitas
0,8-1,0	Reliabilitas baik
0,6-0,799	Reliabilitas diterima
$\geq 0,6$	Reliabilitas kurang baik

### 3.6 Teknik Analisis Data

#### 3.6.1 Statistik Deskriptif

Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan pertanyaan terhadap variabel mandiri yaitu mendeskripsikan tingkat penghasilan, pelayanan fiskus, dan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan.

Menurut Sugiyono (2009) “statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

#### 3.6.2 Analisis Regresi Liner Berganda

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kuantitatif yakni, menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut, dengan rumus dibawah ini:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3$$

Sumber: Sugiono (2016, hal. 230)

Keterangan :

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
a	= Konstanta
$b_1, b_2, b_3$	= Besaran koefisien Regresi dari masing- masing variabel
$X_1$	= Tingkat Penghasilan
$X_2$	= Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan
$X_3$	= Pelayanan Fiskal

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian asumsi klasik atas data yang akan diolah agar memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, konsisten. Adapun sebagai berikut:

#### 3.6.3.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik KolmogorovSmirnov Test.

Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi  $>0,05$

(Ghozali, 2011)

#### 3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas sebaliknya jika varian berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat grafik scatterplot antar nilai prediksi variabel independen dengan nilai residualnya. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2011).

#### 3.6.3.3 Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya bebas multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari: nilai *tolerance* dan lawannya, dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada data yang akan diolah.

### 3.6.4 Uji Hipotesis

Menurut Umar (2005:104) Hipotesis adalah "Suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang di buat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun/mengarahkan penyelidikan selanjutnya. Berdasarkan teori di atas peneliti merumuskan hipotesis untuk penelitian ini, hipotesis yang telah di rumuskan, kemudian harus di uji.

#### 3.6.4.1 Uji T (Parsial)

Uji t (t-test) melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. Dalam penelitian ini digunakan uji dengan taraf signifikansi 0,05.

Dalam hal ini adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:  
1)  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan signifikansi  $> 0,05$  dengan kata lain  $H_0$  diterima maka terdapat pengaruh Tingkat Penghasilan, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan dan Pelayanan Fiskal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2)  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan signifikansi  $< 0,05$  dengan kata lain  $H_a$  diterima maka tidak terdapat pengaruh Tingkat Penghasilan, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan dan Pelayanan Fiskal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jika nilai  $\alpha < 0,05$  maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis diterima, sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya nilai  $\alpha > 0,05$ , maka hipotesis ditolak, berarti tidak ada pengaruh secara signifikan diantara tiga variabel yang diuji.

#### 3.6.4.2 Uji F

Uji statistik F (simultan) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (dependen) dan sekaligus juga untuk menguji hipotesis ke dua. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *significance level* taraf nyata. 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).

$$F_h = \frac{r^2/k}{(1 - r^2)(n - k - 1)}$$

Sumber Sugiono (2016, hal.240 )

Keterangan:

R = koefisien korelasi berganda

K = jumlah variabel independen (bebas)

n = jumlah sampel

$R^2$  = koefisien korelasi ganda yang telah ditentukan

F = F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan F tabel

Kriteria Pengujian:

- 1) Tolak  $H_0$  apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $-F_{hitung} < -F_{tabel}$
- 2) Terima  $H_0$  apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $-F_{hitung} > -F_{tabel}$

Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah:

- a) Jika  $-F_{tabel} < F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima, artinya tingkat penghasilan, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan pelayanan fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- b) Jika  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  dan atau  $-F_{hitung} \leq -F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak, artinya tingkat penghasilan, pengetahuan dan pemahaman terhadap

#### 3.6.4.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel yang digunakan. Koefisien determinasi menjelaskan proporsi variasi dalam variabel dependen (Y) yang dijelaskan oleh hanya satu variabel independen (lebih dari satu variabel bebas:  $X_i$ ;  $i = 1, 2, 3, 4, \text{dst.}$ ) secara bersama-sama. Sementara itu R

adalah koefisien korelasi majemuk yang mengukur tingkat hubungan antara variabel dependen (Y) dengan semua variabel independen yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Data

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan pengolahan data dalam bentuk angket yang terdiri dari 3 pernyataan untuk variabel Tingkat Penghasilan (X1), 7 pernyataan untuk variabel Pengetahuan Perpajakan (X2), 6 pernyataan untuk variabel Pelayanan Fiskus (X3), dan 5 pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang disebarakan kepada 100 orang wajib pajak sebagai responden dari penelitian ini dengan menggunakan metode *Skala Likert* dengan 5 pernyataan yang mana memiliki skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. Dibawah ini data penulisan dideskripsikan melalui data primer berupa angket yang telah diuji berikutnya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi.

#### 4.2 Penyajian Data

##### 4.2.1 Presentase Jawaban Responden Variabel Tingkat Penghasilan

Dibawah ini merupakan tabel presentase jawaban responden berdasarkan variabel tingkat penghasilan:

**Tabel 4.1**

**Persentase Jawaban Responden Tingkat Penghasilan**

Alternatif Jawaban												
No	SS		S		RG		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	-	-	2	2	20	20	63	63	15	15	100	100
2	-	-	-	-	19	19	61	61	20	20	100	100
3	10	10	32	32	30	30	22	22	6	6	100	100

Dari tabel 4.4 dapat dilihat persentase jawaban dari variabel tingkat penghasilan dimana pernyataan pertama mayoritas jawaban dari responden yang memilih jawaban tidak

setuju yang memiliki presentase jawaban sebesar 63%. Pada pernyataan kedua mayoritas jawaban dari responden memilih tidak setuju dengan presentase jawaban sebesar 61%. Pada pernyataan ketiga mayoritas jawaban dari responden memilih setuju dengan presentase jawaban sebesar 32%. Hal ini berarti kuisioner yang disebar kepada responden bernilai sangat baik karena sesuai dengan pemikiran Wajib Pajak kendaraan bermotor selama masa Covid 19 Pada Kantor Samsat Medan Selatan.

#### 4.2.2 Presentase Jawaban Responden Variabel Pengetahuan Perpajakan

Dibawah ini merupakan tabel presentase jawaban responden berdasarkan variabel pengetahuan perpajakan:

**Tabel 4.2**

#### **Persentase Jawaban responden Pengetahuan Perpajakan**

No	Alternatif Jawaban											
	SS		S		RG		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	-	-	4	4	20	20	60	60	16	16	100	100
2	-	-	3	3	21	21	58	58	18	18	100	100
3	-	-	9	9	7	7	57	57	27	27	100	100
4	-	-	-	-	6	6	60	60	34	34	100	100
5	-	-	3	3	20	20	50	50	27	27	100	100
6	-	-	1	1	10	10	60	60	29	29	100	100
7	-	-	2	2	2	2	58	58	38	38	100	100

Dari tabel diatas bisa dilihat persentase jawaban dari variabel pengetahuan perpajakan dimana pernyataan pertama mayoritas jawaban dari responden memilih tidak setuju dengan presentase jawaban sebesar 60%. Pada pernyataan kedua mayoritas jawaban dari responden memilih tidak setuju dengan presentase jawaban sebesar 58%. Pada pernyataan ketiga mayoritas jawaban dari responden memilih tidak setuju dengan presentase jawaban sebesar 57%. Pada pernyataan keempat mayoritas jawaban dari responden memilih tidak setuju dengan presentase jawaban sebesar 60%. Pada pernyataan kelima mayoritas jawaban dari responden memilih tidak setuju dengan presentase jawaban sebesar 50%. Pada pernyataan

keenam mayoritas jawaban dari responden memiliki presentasi jawaban tidak setuju dengan presentase sebesar 60%. Pada pernyataan ketujuh mayoritas jawaban dari responden memilih sangat tidak dengan presentase jawaban sebesar 58%. Hal ini berarti kuisioner yang disebar kepada responden bernilai sangat baik karena sesuai dengan pemikiran Wajib Pajak kendaraan bermotor selama masa Covid 19 Pada Kantor Samsat Medan Selatan.

#### 4.2.3 Presentase Jawaban Responden Variabel Pelayanan Fiskus

Dibawah ini merupakan tabel presentase jawaban responden berdasarkan variabel pelayanan fiskus:

**Tabel 4.3**

#### **Persentase Jawaban Responden Pelayanan Fiskus**

No	Alternatif Jawaban											
	SS		S		RG		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	-	-	-	-	3	3	55	55	42	42	100	100
2	-	-	-	-	6	6	49	49	45	45	100	100
3	-	-	-	-	10	10	42	42	48	48	100	100
4	-	-	-	-	5	5	48	48	47	47	100	100
5	-	-	1	1	3	3	51	51	45	45	100	100
6	-	-	-	-	5	5	49	49	46	46	100	100

Dari tabel diatas bisa dilihat persentase jawaban dari variabel pelayanan fiskus dimana pernyataan pertama mayoritas jawaban dari responden memilih tidak setuju dengan presentase jawaban sebesar 55%. Pada pernyataan kedua mayoritas jawaban dari responden memilih tidak setuju dengan presentase jawaban sebesar 49%. Pada pernyataan ketiga mayoritas jawaban dari responden memilih sangat tidak setuju dengan presentase jawaban sebesar 48%. Pada pernyataan keempat mayoritas jawaban dari responden memilih tidak setuju dengan presentase jawaban sebesar 48%. Pada pernyataan kelima mayoritas jawaban dari responden memilih tidak setuju dengan presentase jawaban sebesar 51%. Pada pernyataan keenam mayoritas jawaban dari responden memilih tidak setuju dengan

presentase jawaban sebesar 49%. Hal ini berarti kuisioner yang disebar kepada responden bernilai sangat baik karena sesuai dengan pemikiran Wajib Pajak kendaraan bermotor selama masa Covid 19 Pada Kantor Samsat Medan Selatan.

#### 4.2.4. Persentase Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Dibawah ini merupakan tabel presentase jawaban responden berdasarkan variabel kepatuhan wajib pajak:

**Tabel 4.4**

**Persentase Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Alternatif Jawaban											
	SS		S		RG		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	-	-	1	1	15	15	58	58	26	26	100	100
2	-	-	23	23	24	24	44	44	9	9	100	100
3	-	-	10	10	38	38	38	38	14	14	100	100
4	3	3	25	25	44	44	19	19	9	9	100	100
5	3	3	14	14	24	24	42	42	17	17	100	100

Dari tabel diatas bisa dilihat persentase jawaban dari variabel kepatuhan wajib pajak dimana pernyataan pertama mayoritas jawaban dari responden memilih tidak setuju dengan presentase jawaban sebesar 58%. Pada pernyataan kedua mayoritas jawaban dari responden memilih tidak setuju dengan presentase jawaban sebesar 44%. Pada pernyataan ketiga mayoritas jawaban dari responden memilih ragu dan tidak setuju dengan presentase jawaban sebesar 38%. Pada pernyataan keempat mayoritas jawaban dari responden memilih ragu dengan presentase jawaban sebesar 44%. Pada pernyataan kelima mayoritas jawaban dari responden memilih tidak setuju dengan presentase jawaban sebesar 42%. Hal ini berarti kuisioner yang disebar kepada responden bernilai sangat baik karena sesuai dengan pemikiran Wajib Pajak kendaraan bermotor selama masa Covid 19 Pada Kantor Samsat Medan Selatan.

### 4.3 Analisis Data

#### 4.3.1 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data terbagi menjadi dua macam yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Berikut ini merupakan hasil pengujian dari uji validitas dan uji reliabilitas.

##### 4.3.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji kebenaran suatu instrumen penelitian, jika instrumen penelitian dinyatakan valid maka hasil pengukuran kemungkinan benar.

##### 4.3.1.1.1 Variabel Tingkat Penghasilan

Dibawah ini merupakan tabel dari hasil uji validitas variabel tingkat penghasilan yang diuji dengan menggunakan program SPSS versi 21:

**Tabel 4.5**

**Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Penghasilan**

Item	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
No.1	0,675	0,000 < 0,05	Valid
No.2	0,719	0,000 < 0,05	Valid
No.3	0,683	0,000 < 0,05	Valid

Dari tabel di atas hasil output SPSS diketahui nilai validitas terdapat kolom nilai korelasi yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Pada setiap butir pernyataan dapat dilihat bahwa nilai probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$  yang artinya pernyataan tersebut dinyatakan valid.

##### 4.3.1.1.2 Variabel Pengetahuan Perpajakan

Dibawah ini merupakan tabel dari hasil uji validitas variabel pengetahuan perpajakan yang diuji dengan menggunakan program SPSS versi 21:

**Tabel 4.6****Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan**

<b>Item</b>	<b>Nilai Korelasi</b>	<b>Probabilitas</b>	<b>Keterangan</b>
No.1	0,643	0,000 < 0,05	Valid
No.2	0,450	0,000 < 0,05	Valid
No.3	0,671	0,000 < 0,05	Valid
No.4	0,534	0,000 < 0,05	Valid
No.5	0,531	0,000 < 0,05	Valid
No.6	0,433	0,000 < 0,05	Valid
No.7	0,420	0,000 < 0,05	Valid

Dari tabel di atas hasil output SPSS diketahui nilai validitas terdapat kolom nilai kolerasi yang artinya nilai kolerasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Pada setiap butir pernyataan dapat dilihat bahwa nilai probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$  yang artinya pernyataan tersebut dinyatakan valid.

**4.3.1.1.3 Variabel Pelayanan Fiskus**

Dibawah ini merupakan tabel dari hasil uji validitas variabel pelayanan fiskus yang diuji dengan menggunakan program SPSS versi 21:

**Tabel 4.7****Hasil Uji Validitas Variabel Pelayanan Fiskus**

<b>Item</b>	<b>Nilai Korelasi</b>	<b>Probabilitas</b>	<b>Keterangan</b>
No.1	0,632	0,000 < 0,05	Valid
No.2	0,685	0,000 < 0,05	Valid
No.3	0,658	0,000 < 0,05	Valid
No.4	0,548	0,000 < 0,05	Valid
No.5	0,534	0,000 < 0,05	Valid
No.6	0,576	0,000 < 0,05	Valid

Dari tabel di atas hasil output SPSS diketahui nilai validitas terdapat kolom nilai kolerasi yang artinya nilai kolerasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Pada setiap butir pernyataan dapat dilihat bahwa nilai probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$  yang artinya pernyataan tersebut dinyatakan valid.

#### 4.3.1.1.4 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Dibawah ini merupakan tabel dari hasil uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak yang diuji dengan menggunakan program SPSS versi 21:

**Tabel 4.8**

#### Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
No.1	0,594	0,000 < 0,05	Valid
No.2	0,707	0,000 < 0,05	Valid
No.3	0,683	0,000 < 0,05	Valid
No.4	0,734	0,000 < 0,05	Valid
No.5	0,312	0,002 < 0,05	Valid

Dari tabel di atas hasil output SPSS diketahui nilai validitas terdapat kolom nilai kolerasi yang artinya nilai kolerasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Pada setiap butir pernyataan pertama dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dibawah 0,05 yang artinya pernyataan tersebut dinyatakan valid.

#### 4.3.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi atau kestabilan skor suatu instrumen penelitian terhadap individu yang sama, dan diberikan dalam waktu yang berbeda. Jadi suatu intrumen dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut dicoba kepada subjek yang sama secara berulang-ulang namun hasilnya tetap sama atau relatif sama. Berikut ini merupakan tabel dari hasil uji reliabilitas setiap variabel:

**Tabel 4.9**

#### Hasil Uji Reliabilitas

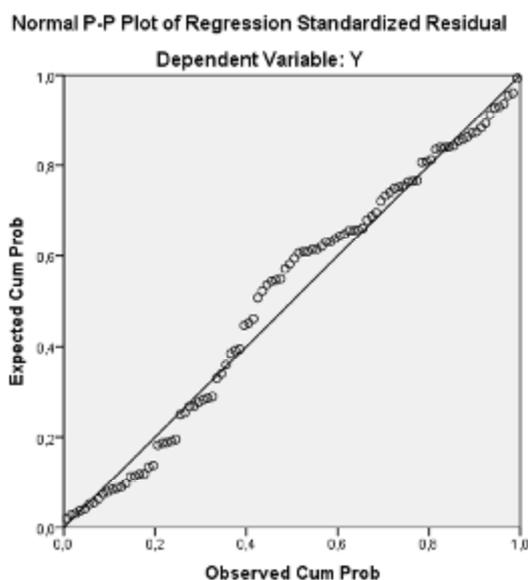
Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Status
Tingkat Penghasilan	0,713	3	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,699	7	Reliabel
Pelayanan Fiskus	0,654	6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,767	5	Reliabel

Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila nilai koefisien *Cronbach Alpha* adalah sebesar:  $>0,6$  atau 60%. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan dari masing-masing variabel yang diteliti dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbach Alpha* dari setiap variabel  $>0,6$  atau 60%.

## 4.3.2 Uji Asumsi Klasik

### 4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat dalam model regresi, variabel independen dan dependennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Berikut ini merupakan hasil uji normalitas yang dijabarkan dalam bentuk gambar:



**Gambar 4.1**

### Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa data menyebar mengikuti garis diagonal artinya data antara variabel dependen yaitu tingkat penghasilan, pengetahuan

perpajakan, dan pelayanan fiskus serta variabel independennya yaitu kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan atau distribusi yang normal atau memenuhi uji asumsi normalitas.

#### 4.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 4.10**

#### Hasil Uji Multikolinearitas

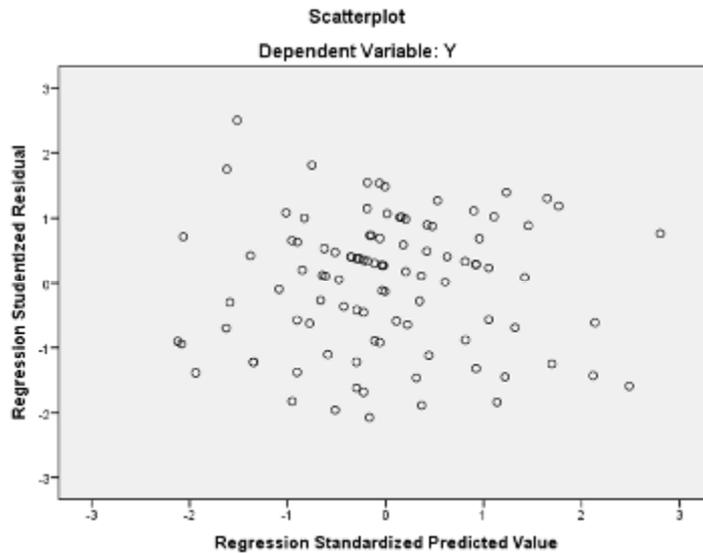
		Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,917	1,666		5,352	,000		
	X1	-,243	,149	-,169	-1,633	,106	,834	1,200
	X2	,428	,107	,419	3,983	,000	,808	1,238
	X3	-,055	,118	-,045	-,464	,644	,965	1,036

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel tingkat penghasilan (X1) sebesar 1,200, variabel pengetahuan perpajakan (X2) sebesar 1,238 dan variabel pelayanan fiskus (X3) sebesar 1,036. Ketiga variabel independen memiliki nilai VIF dalam batas toleransi yang telah ditentukan (tidak melebihi 4 atau 5), sehingga tidak terjadi multikolinearitas dalam variabel independen penelitian ini.

#### 4.3.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dalam suatu pengamatan yang lain. Jika variasi residual dari suatu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika varian berbeda disebut heterokedastisitas. Dibawah ini merupakan hasil dari uji heterokedastisitas:



**Gambar 4.2**

### Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar di atas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas/teratur, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian “tidak terjadi heterokedastisitas” pada model regresi yang diteliti.

#### 4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut ini merupakan hasil dari analisis regresi linear berganda yang diuji dengan menggunakan SPSS versi 21:

**Tabel 4.11**

### Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,917	1,666		5,352	,000		
	X1	-,243	,149	-,169	-1,633	,106	,834	1,200
	X2	,428	,107	,419	3,983	,000	,808	1,238
	X3	-,055	,118	-,045	-,464	,644	,965	1,036

a. Dependent Variable: Y

**Persamaan Regresi:**

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$= 8,917 + (-0,243X_1) + 0,428X_2 + (-0,055X_3) + e$$

### Interpretasi:

- Nilai *constant* 8,917. Hal ini berarti bahwa, jika tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus sama dengan nol atau *constant* maka kepatuhan wajib pajak adalah 8,917 satuan.
- Nilai koefisien tingkat penghasilan -0,243. Hal ini berarti jika tingkat penghasilan meningkat satu-satuan maka kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor Kantor Samsat Medan Selatan meningkat -0,243 satu-satuan.
- Nilai koefisien pengetahuan perpajakan 0,428. Hal ini berarti jika pengetahuan perpajakan meningkat satu-satuan maka kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor Kantor Samsat Medan Selatan meningkat 0,428 satu-satuan.
- Nilai koefisien pelayanan fiskus -0,055. Hal ini berarti jika pelayanan fiskus meningkat satu-satuan maka kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor Kantor Samsat Medan Selatan meningkat -0,055 satu-satuan.

### 4.3.4 Uji Hipotesis

#### 4.3.4.1 Uji t Hitung (Parsial)

Berikut ini merupakan hasil dari uji t hitung (parsial) yang diuji dengan menggunakan SPSS versi 21:

**Tabel 4.12**

#### Hasil Uji t Hitung

		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	8,917	1,666		5,352	,000		

X1	-,243	,149	-,169	-1,633	,106	,834	1,200
X2	,428	,107	,419	3,983	,000	,808	1,238
X3	-,055	,118	-,045	-,464	,644	,965	1,036

a. Dependent Variable: Y

Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat  $\alpha = 5\%$  dilakukan dengan cara menghitung  $dk = n - k$  pada nilai  $n = 100$ , sedangkan  $k = 3$  sehingga  $dk = 100 - 3 = 97$ . Sementara itu nilai t tabel untuk  $dk = 97$  adalah sebesar 1,661.

Tabel diatas menunjukkan hasil parsialnya adalah sebagai berikut:

1) Variabel Tingkat Penghasilan

$T_{hitung}$  Tingkat Penghasilan = -1,633 maka diperoleh  $T_{hitung} < T_{tabel}$  atau -1,633 < 1,661, nilai signifikan 0.106 > 0.05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti bahwa variabel tingkat penghasilan (x1) secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Variabel Pengetahuan Pajak

$T_{hitung}$  pengetahuan pajak = 3,983 maka diperoleh  $T_{hitung} > T_{tabel}$  atau 3,983 > 1,661, nilai signifikan 0.000 < 0.05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti bahwa variabel pengetahuan pajak (x2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Variabel Pelayanan Fiskus

$T_{hitung}$  pelayanan fiskus = -0,464 maka diperoleh  $T_{hitung} < T_{tabel}$  atau -0,464 < 1,661, nilai signifikan 0.644 > 0.05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti bahwa variabel Pelayanan Fiskus (x3) secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4.3.4.2 Uji F Hitung (Simultan)

Berikut ini merupakan hasil dari uji t hitung (parsial) yang diuji dengan menggunakan SPSS versi 21:

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji F Hitung**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	100,775	3	33,592	5,307	,002 <sup>b</sup>
	Residual	607,665	96	6,330		
	Total	708,440	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Untuk menguji hipotesis statistik di atas, maka dilakukan uji F pada tingkat  $\alpha = 5\%$  adalah sebagai berikut :

$$F_{\text{tabel}} = n - k - 1 = 100 - 3 - 1 = 96$$

$$F_{\text{hitung}} = 5,307 \text{ dan } F_{\text{tabel}} = 3,255$$

Berdasarkan hasil pengujian diatas, nilai  $F_{\text{hitung}}$  tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus adalah sebesar 5,307 dan  $F_{\text{tabel}}$  diketahui sebesar 3,255. Dengan demikian  $F_{\text{hitung}}$  lebih besar dari  $F_{\text{tabel}}$  atau  $5,307 > 3,255$ . Kemudian dilihat dari hasil kepatuhan wajib pajak nilai signifikan adalah sebesar  $0,002 < 0,05$ . Dengan demikian  $H_0$  ditolak ( $H_a$  diterima). Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4.3.5 Koefisien Determinasi

Dibawah ini merupakan hasil dari uji koefisien determinasi yang diuji dengan menggunakan SPSS versi 21:

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,377 <sup>a</sup>	,142	,115	2,51592

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa hasil nilai R-Square sebesar 0,142 hal ini berarti 14,2% variasi kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variasi tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus. Sisanya 85,8 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### **4.4 Interpretasi Hasil Analisis Data**

##### **4.4.1 Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian nilai  $T_{hitung}$  Tingkat Penghasilan = -1,633 maka diperoleh  $T_{hitung} < T_{tabel}$  atau  $-1,633 < 1,661$ , nilai signifikan  $0.106 > 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti bahwa variabel tingkat penghasilan ( $x_1$ ) secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Artinya tingkat penghasilan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana jika semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak tidak akan meningkat. Hal tersebut menjawab salah satu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan pembahasan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rahman, 2017) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan memiliki tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Qorina, 2019) yang menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4.4.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian nilai  $T_{hitung}$  pengetahuan pajak = 3,983 maka diperoleh  $T_{hitung} > T_{tabel}$  atau  $3,983 > 1,661$ , nilai signifikan  $0.000 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti bahwa variabel pengetahuan pajak ( $x_2$ ) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Artinya pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana jika wajib pajak memiliki pengetahuan terhadap perpajakan, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian ini sejalan dengan pembahasan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Parera & Erawati, 2017) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian ini juga sesuai dengan yang dilakukan oleh (Murti et al., 2014) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4.4.3 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian nilai  $T_{hitung}$  pelayanan fiskus = -0,464 maka diperoleh  $T_{hitung} < T_{tabel}$  atau  $-0,464 < 1,661$ , nilai signifikan  $0.644 > 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti bahwa variabel Pelayanan Fiskus ( $x_3$ ) secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

dan signifikan secara simultan antara tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

Artinya secara bersama-sama tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena jika tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus meningkat, maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian ini sejalan dengan pembahasan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Febriani & Kusmuriyanto, 2015) yang menunjukkan bahwa tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus meningkat, memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Artinya Pelayanan Fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana jika pelayanan fiskus yang diberikan semakin menurun, maka tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian ini sejalan dengan pembahasan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Tene et al., 2017) yang menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian, penelitian ini bertolak belakan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Parera & Erawati, 2017) yang menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.4.4 Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian diatas, nilai  $F_{hitung}$  tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus adalah sebesar 5,307 dan  $F_{tabel}$  diketahui sebesar 3,255. Dengan demikian  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  atau  $5,307 > 3,255$ . Kemudian dilihat dari hasil kepatuhan wajib pajak nilai signifikan adalah sebesar  $0,002 < 0,05$ . Dengan demikian  $H_0$  ditolak ( $H_a$  diterima). Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh positif

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa covid 19 pada Kantor Samsat Medan Selatan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penghasilan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa covid 19 pada Kantor Samsat Medan Selatan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa covid 19 pada Kantor Samsat Medan Selatan.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa covid 19 pada Kantor Samsat Medan Selatan.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana artinya kedua variabel tersebut secara bersama akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa covid 19 pada Kantor Samsat Medan Selatan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Secara umum para wajib pajak disarankan untuk lebih patuh lagi terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Perusahaan juga harus melakukan tindakan-tindakan yang dapat membuat wajib pajak untuk dapat patuh terhadap perpajakan
3. Untuk penelitian selanjutnya di harapkan untuk lebih memperluas penelitian yang belum dimasukkan dalam penelitian ini, karena kemungkinan masih banyak lagi hal-hal yang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak agar penelitian menjadi akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyansyah, A., Kertahadi, & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepuasan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Wilayah Kerja KPP Pratama Blitar). *Jurnal Perpajakan*, 11(1), 1–10.
- Dan, P., Pajak, W., Bumi, P., Bangunan, D. A. N., Perdesaan, D. A. N., Kecamatan, P., Barat, I., Kota, I., Nama, S., Nim, R. D., Palembang, U. M., & Bisnis, E. D. A. N. (2015). \ : 22 2011 321.
- Farley, R. C. (1984). The Effects of a Self-Instructional Self-Management Training Package on the Generalization and Maintenance of Selected Interview Skills: A Pilot Study . *Journal of Applied Rehabilitation Counseling*, 15(2), 50–53. <https://doi.org/10.1891/0047-2220.15.2.50>
- Febriani, Y., & Kusmuriyanto. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(4), 1–10.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Krisnadeva, A. A. N., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>
- Murti, H. W., Sondakh, J. J., & Sabijono, H. (2014). Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado. *Jurnal EMBA2*, 2(3), 389–398.
- Noerman Syah, A. L., & Wati, K. (2017). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor ( Studi Empiris Pada Kantor Uppd / Samsat Brebes ). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*,

1(2), 65–77. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.119>

- Pajak, W., Bermotor, K., Kantor, D. I., & Jati, I. K. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(1), 557–587.
- Parera, A. M. W., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37–48.
- Pendidikan, J., Sekolah, G., & Pendidikan, F. I. (2020). *diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan*. 1642003.
- Pratama, ferina nadya. (2020). Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Staphylococcus aureus Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember. *Skripsi*.
- Qorina, R. (2019). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta*.
- Rahman, A. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Rasmini, M. (n.d.). *Dasar-dasar Perpajakan*. 1–41.
- Sari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (Uppp) Kabupaten Seluma. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 63–78. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i1.5>
- Syah, A. langgeng N., & Krisdiyawati. (2017). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor UPPD/Samsat Brebes). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2,

65–77.

- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*2, 5(2), 443–453.
- Villela, lucia maria aversa. (2013). Jurnal Informasi dan Pemodelan Kimia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Wulandari, D. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sistem samsat drive thru dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak .... *Skripsi-2020*, 2020(April).

**Correlations**

		X1.1	X1.2	X1.3	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,693**	,149	,675**
	Sig. (2-tailed)		,000	,139	,000
	N	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	,693**	1	,242*	,719**
	Sig. (2-tailed)	,000		,015	,000
	N	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	,149	,242*	1	,683**
	Sig. (2-tailed)	,139	,015		,000
	N	100	100	100	100
X1	Pearson Correlation	,675**	,719**	,683**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Correlations**

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,515**	,223*	,183	,094	,112	,248*	,643**
	Sig. (2-tailed)		,000	,026	,069	,354	,268	,013	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	,515**	1	,020	-,012	-,017	,168	,066	,450**
	Sig. (2-tailed)	,000		,844	,906	,869	,095	,513	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	,223*	,020	1	,368**	,451**	,145	,085	,617**
	Sig. (2-tailed)	,026	,844		,000	,000	,151	,401	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	,183	-,012	,368**	1	,200*	,174	,145	,534**
	Sig. (2-tailed)	,069	,906	,000		,046	,084	,151	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	,094	-,017	,451**	,200*	1	,120	,078	,531**
	Sig. (2-tailed)	,354	,869	,000	,046		,235	,441	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	,112	,168	,145	,174	,120	1	,143	,433**
	Sig. (2-tailed)	,268	,095	,151	,084	,235		,156	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.7	Pearson Correlation	,248*	,066	,085	,145	,078	,143	1	,420**
	Sig. (2-tailed)	,013	,513	,401	,151	,441	,156		,000

N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2 Pearson Correlation	,643**	,450**	,617**	,534**	,531**	,433**	,420**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N	100	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Correlations

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3
X3.1 Pearson Correlation	1	,545**	,199*	,207*	,165	,251*	,632**
Sig. (2-tailed)		,000	,047	,039	,101	,012	,000
N	100	100	100	100	100	100	100
X3.2 Pearson Correlation	,545**	1	,460**	,160	,039	,286**	,685**
Sig. (2-tailed)	,000		,000	,111	,700	,004	,000
N	100	100	100	100	100	100	100
X3.3 Pearson Correlation	,199*	,460**	1	,234*	,222*	,192	,658**
Sig. (2-tailed)	,047	,000		,019	,026	,055	,000
N	100	100	100	100	100	100	100
X3.4 Pearson Correlation	,207*	,160	,234*	1	,262**	,139	,548**
Sig. (2-tailed)	,039	,111	,019		,009	,166	,000
N	100	100	100	100	100	100	100
X3.5 Pearson Correlation	,165	,039	,222*	,262**	1	,245*	,534**
Sig. (2-tailed)	,101	,700	,026	,009		,014	,000
N	100	100	100	100	100	100	100
X3.6 Pearson Correlation	,251*	,286**	,192	,139	,245*	1	,576**
Sig. (2-tailed)	,012	,004	,055	,166	,014		,000
N	100	100	100	100	100	100	100
X3 Pearson Correlation	,632**	,685**	,658**	,548**	,534**	,576**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Correlations

	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y
Y.1 Pearson Correlation	1	,441**	,229*	,290**	,029	,594**
Sig. (2-tailed)		,000	,022	,003	,776	,000
N	100	100	100	100	100	100
Y.2 Pearson Correlation	,441**	1	,553**	,409**	-,207*	,707**
Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,039	,000

	N	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	,229*	,553**	1	,412**	-,096	,683**
	Sig. (2-tailed)	,022	,000		,000	,343	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	,290**	,409**	,412**	1	,068	,734**
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,000		,503	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	,029	-,207*	-,096	,068	1	,312**
	Sig. (2-tailed)	,776	,039	,343	,503		,002
	N	100	100	100	100	100	100
Y	Pearson Correlation	,594**	,707**	,683**	,734**	,312**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,002	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,699	7

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,713	3

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,654	6

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,767	5

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,377 <sup>a</sup>	,142	,115	2,51592

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	100,775	3	33,592	5,307	,002 <sup>b</sup>
	Residual	607,665	96	6,330		
	Total	708,440	99			

a. Dependent Variable: Y

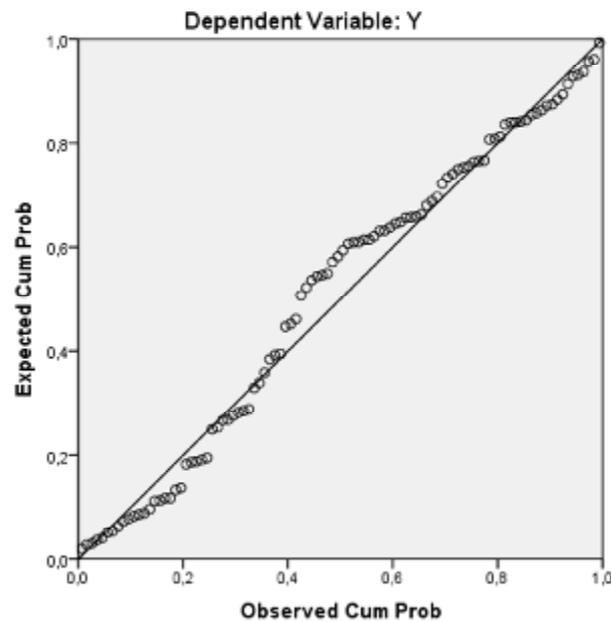
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

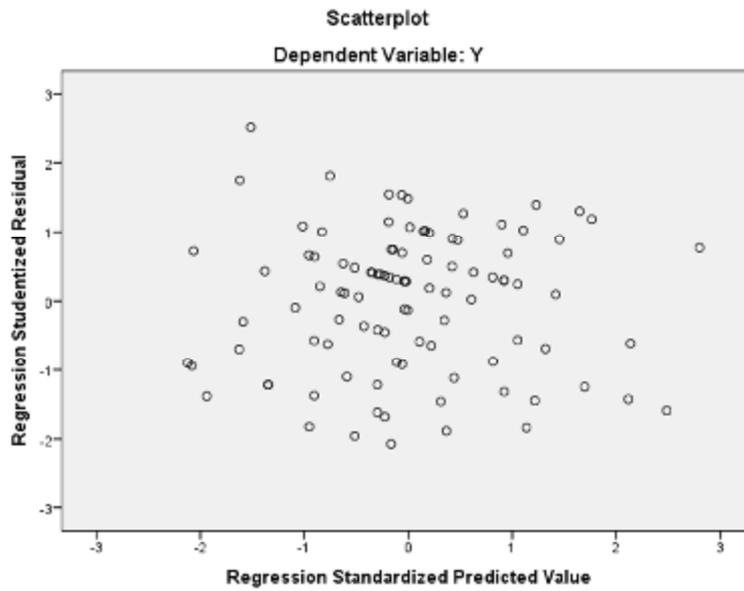
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8,917	1,666		5,352	,000		
X1	-,243	,149	-,169	-1,633	,106	,834	1,200
X2	,428	,107	,419	3,983	,000	,808	1,238
X3	-,055	,118	-,045	-,464	,644	,965	1,036

a. Dependent Variable: Y

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**





**X1.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	15	15,0	15,0	15,0
	2,00	63	63,0	63,0	78,0
	3,00	20	20,0	20,0	98,0
	4,00	2	2,0	2,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**X1.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	20	20,0	20,0	20,0
	2,00	61	61,0	61,0	81,0
	3,00	19	19,0	19,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**X1.3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	6	6,0	6,0	6,0
	2,00	22	22,0	22,0	28,0
	3,00	30	30,0	30,0	58,0
	4,00	32	32,0	32,0	90,0
	5,00	10	10,0	10,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**X2.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	16	16,0	16,0	16,0
	2,00	60	60,0	60,0	76,0
	3,00	20	20,0	20,0	96,0
	4,00	4	4,0	4,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**X2.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	18	18,0	18,0	18,0
	2,00	58	58,0	58,0	76,0
	3,00	21	21,0	21,0	97,0
	4,00	3	3,0	3,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**X2.3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	27	27,0	27,0	27,0
	2,00	57	57,0	57,0	84,0
	3,00	7	7,0	7,0	91,0
	4,00	9	9,0	9,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**X2.4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	34	34,0	34,0	34,0
	2,00	60	60,0	60,0	94,0
	3,00	6	6,0	6,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**X2.5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	27	27,0	27,0	27,0
	2,00	50	50,0	50,0	77,0
	3,00	20	20,0	20,0	97,0
	4,00	3	3,0	3,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**X2.6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	29	29,0	29,0	29,0
	2,00	60	60,0	60,0	89,0
	3,00	10	10,0	10,0	99,0
	4,00	1	1,0	1,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**X2.7**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	38	38,0	38,0	38,0
	2,00	58	58,0	58,0	96,0
	3,00	2	2,0	2,0	98,0
	4,00	2	2,0	2,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**X3.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	42	42,0	42,0	42,0
	2,00	55	55,0	55,0	97,0
	3,00	3	3,0	3,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**X3.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	45	45,0	45,0	45,0
	2,00	49	49,0	49,0	94,0
	3,00	6	6,0	6,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**X3.3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	48	48,0	48,0	48,0
	2,00	42	42,0	42,0	90,0
	3,00	10	10,0	10,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**X3.4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	47	47,0	47,0	47,0
	2,00	48	48,0	48,0	95,0
	3,00	5	5,0	5,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**X3.5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	45	45,0	45,0	45,0
	2,00	51	51,0	51,0	96,0
	3,00	3	3,0	3,0	99,0
	4,00	1	1,0	1,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**X3.6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	46	46,0	46,0	46,0
	2,00	49	49,0	49,0	95,0
	3,00	5	5,0	5,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**Y.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	26	26,0	26,0	26,0
	2,00	58	58,0	58,0	84,0
	3,00	15	15,0	15,0	99,0
	4,00	1	1,0	1,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**Y.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	9	9,0	9,0	9,0
	2,00	44	44,0	44,0	53,0
	3,00	24	24,0	24,0	77,0
	4,00	23	23,0	23,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	14	14,0	14,0	14,0
	2,00	38	38,0	38,0	52,0
	3,00	38	38,0	38,0	90,0
	4,00	10	10,0	10,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	9	9,0	9,0	9,0
	2,00	19	19,0	19,0	28,0
	3,00	44	44,0	44,0	72,0
	4,00	25	25,0	25,0	97,0
	5,00	3	3,0	3,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	17	17,0	17,0	17,0
	2,00	42	42,0	42,0	59,0
	3,00	24	24,0	24,0	83,0
	4,00	14	14,0	14,0	97,0
	5,00	3	3,0	3,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**Lampiran nilai t Tabel, F Tabel dan Durbin Watson**

Tabel t

dk	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005	0,001	0,0005
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	318,309	636,619
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	22,327	31,599
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	10,215	12,924
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	7,173	8,610
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	5,893	6,869
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,208	5,959
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,785	5,408
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	4,501	5,041
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,297	4,781
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,144	4,587

11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,025	4,437
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,930	4,318
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,852	4,221
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,787	4,140
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	3,733	4,073
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	3,686	4,015
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,646	3,965
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,610	3,922
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,579	3,883
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,552	3,850
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,527	3,819
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,505	3,792
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,485	3,768
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,467	3,745
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,450	3,725
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,435	3,707
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,421	3,690
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,408	3,674
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,396	3,659
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,385	3,646
31	1,309	1,696	2,040	2,453	2,744	3,375	3,633
32	1,309	1,694	2,037	2,449	2,738	3,365	3,622
33	1,308	1,692	2,035	2,445	2,733	3,356	3,611
34	1,307	1,691	2,032	2,441	2,728	3,348	3,601
35	1,306	1,690	2,030	2,438	2,724	3,340	3,591
36	1,306	1,688	2,028	2,434	2,719	3,333	3,582
37	1,305	1,687	2,026	2,431	2,715	3,326	3,574
38	1,304	1,686	2,024	2,429	2,712	3,319	3,566
39	1,304	1,685	2,023	2,426	2,708	3,313	3,558
40	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,307	3,551
41	1,303	1,683	2,020	2,421	2,701	3,301	3,544
42	1,302	1,682	2,018	2,418	2,698	3,296	3,538
43	1,302	1,681	2,017	2,416	2,695	3,291	3,532
44	1,301	1,680	2,015	2,414	2,692	3,286	3,526
45	1,301	1,679	2,014	2,412	2,690	3,281	3,520
46	1,300	1,679	2,013	2,410	2,687	3,277	3,515
47	1,300	1,678	2,012	2,408	2,685	3,273	3,510
48	1,299	1,677	2,011	2,407	2,682	3,269	3,505
49	1,299	1,677	2,010	2,405	2,680	3,265	3,500
50	1,299	1,676	2,009	2,403	2,678	3,261	3,496
51	1,298	1,675	2,008	2,402	2,676	3,258	3,492
52	1,298	1,675	2,007	2,400	2,674	3,255	3,488

53	1,298	1,674	2,006	2,399	2,672	3,251	3,484
54	1,297	1,674	2,005	2,397	2,670	3,248	3,480
55	1,297	1,673	2,004	2,396	2,668	3,245	3,476
56	1,297	1,673	2,003	2,395	2,667	3,242	3,473
57	1,297	1,672	2,002	2,394	2,665	3,239	3,470
58	1,296	1,672	2,002	2,392	2,663	3,237	3,466
59	1,296	1,671	2,001	2,391	2,662	3,234	3,463
60	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	3,232	3,460
61	1,296	1,670	2,000	2,389	2,659	3,229	3,457
62	1,295	1,670	1,999	2,388	2,657	3,227	3,454
63	1,295	1,669	1,998	2,387	2,656	3,225	3,452
64	1,295	1,669	1,998	2,386	2,655	3,223	3,449
65	1,295	1,669	1,997	2,385	2,654	3,220	3,447
66	1,295	1,668	1,997	2,384	2,652	3,218	3,444
67	1,294	1,668	1,996	2,383	2,651	3,216	3,442
68	1,294	1,668	1,995	2,382	2,650	3,214	3,439
69	1,294	1,667	1,995	2,382	2,649	3,213	3,437
70	1,294	1,667	1,994	2,381	2,648	3,211	3,435
71	1,294	1,667	1,994	2,380	2,647	3,209	3,433
72	1,293	1,666	1,993	2,379	2,646	3,207	3,431
73	1,293	1,666	1,993	2,379	2,645	3,206	3,429
74	1,293	1,666	1,993	2,378	2,644	3,204	3,427
75	1,293	1,665	1,992	2,377	2,643	3,202	3,425
76	1,293	1,665	1,992	2,376	2,642	3,201	3,423
77	1,293	1,665	1,991	2,376	2,641	3,199	3,421
78	1,292	1,665	1,991	2,375	2,640	3,198	3,420
79	1,292	1,664	1,990	2,374	2,640	3,197	3,418
80	1,292	1,664	1,990	2,374	2,639	3,195	3,416
81	1,292	1,664	1,990	2,373	2,638	3,194	3,415
82	1,292	1,664	1,989	2,373	2,637	3,193	3,413
83	1,292	1,663	1,989	2,372	2,636	3,191	3,412
84	1,292	1,663	1,989	2,372	2,636	3,190	3,410
85	1,292	1,663	1,988	2,371	2,635	3,189	3,409
86	1,291	1,663	1,988	2,370	2,634	3,188	3,407
87	1,291	1,663	1,988	2,370	2,634	3,187	3,406
88	1,291	1,662	1,987	2,369	2,633	3,185	3,405
89	1,291	1,662	1,987	2,369	2,632	3,184	3,403
90	1,291	1,662	1,987	2,368	2,632	3,183	3,402
91	1,291	1,662	1,986	2,368	2,631	3,182	3,401
92	1,291	1,662	1,986	2,368	2,630	3,181	3,399
93	1,291	1,661	1,986	2,367	2,630	3,180	3,398
94	1,291	1,661	1,986	2,367	2,629	3,179	3,397

95	1,291	1,661	1,985	2,366	2,629	3,178	3,396
96	1,290	1,661	1,985	2,366	2,628	3,177	3,395
97	1,290	1,661	1,985	2,365	2,627	3,176	3,394
98	1,290	1,661	1,984	2,365	2,627	3,175	3,393
99	1,290	1,660	1,984	2,365	2,626	3,175	3,392
100	1,290	1,660	1,984	2,364	2,626	3,174	3,390
∞	1,282	1,646	1,962	2,330	2,581	3,174	3,300

Tabel F

df untuk penyebut	df untuk Pembilang									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	647,789	799,500	864,163	899,583	921,848	937,111	948,217	956,656	963,285	968,627
2	38,506	39,000	39,165	39,248	39,298	39,331	39,355	39,373	39,387	39,398
3	17,443	16,044	15,439	15,101	14,885	14,735	14,624	14,540	14,473	14,419
4	12,218	10,649	9,979	9,605	9,364	9,197	9,074	8,980	8,905	8,844
5	10,007	8,434	7,764	7,388	7,146	6,978	6,853	6,757	6,681	6,619
6	8,813	7,260	6,599	6,227	5,988	5,820	5,695	5,600	5,523	5,461
7	8,073	6,542	5,890	5,523	5,285	5,119	4,995	4,899	4,823	4,761
8	7,571	6,059	5,416	5,053	4,817	4,652	4,529	4,433	4,357	4,295
9	7,209	5,715	5,078	4,718	4,484	4,320	4,197	4,102	4,026	3,964
10	6,937	5,456	4,826	4,468	4,236	4,072	3,950	3,855	3,779	3,717
11	6,724	5,256	4,630	4,275	4,044	3,881	3,759	3,664	3,588	3,526
12	6,554	5,096	4,474	4,121	3,891	3,728	3,607	3,512	3,436	3,374
13	6,414	4,965	4,347	3,996	3,767	3,604	3,483	3,388	3,312	3,250
14	6,298	4,857	4,242	3,892	3,663	3,501	3,380	3,285	3,209	3,147
15	6,200	4,765	4,153	3,804	3,576	3,415	3,293	3,199	3,123	3,060
16	6,115	4,687	4,077	3,729	3,502	3,341	3,219	3,125	3,049	2,986
17	6,042	4,619	4,011	3,665	3,438	3,277	3,156	3,061	2,985	2,922
18	5,978	4,560	3,954	3,608	3,382	3,221	3,100	3,005	2,929	2,866
19	5,922	4,508	3,903	3,559	3,333	3,172	3,051	2,956	2,880	2,817
20	5,871	4,461	3,859	3,515	3,289	3,128	3,007	2,913	2,837	2,774
21	5,827	4,420	3,819	3,475	3,250	3,090	2,969	2,874	2,798	2,735
22	5,786	4,383	3,783	3,440	3,215	3,055	2,934	2,839	2,763	2,700
23	5,750	4,349	3,750	3,408	3,183	3,023	2,902	2,808	2,731	2,668
24	5,717	4,319	3,721	3,379	3,155	2,995	2,874	2,779	2,703	2,640
25	5,686	4,291	3,694	3,353	3,129	2,969	2,848	2,753	2,677	2,613
26	5,659	4,265	3,670	3,329	3,105	2,945	2,824	2,729	2,653	2,590
27	5,633	4,242	3,647	3,307	3,083	2,923	2,802	2,707	2,631	2,568
28	5,610	4,221	3,626	3,286	3,063	2,903	2,782	2,687	2,611	2,547
29	5,588	4,201	3,607	3,267	3,044	2,884	2,763	2,669	2,592	2,529
30	5,568	4,182	3,589	3,250	3,026	2,867	2,746	2,651	2,575	2,511
31	5,549	4,165	3,573	3,234	3,010	2,851	2,730	2,635	2,558	2,495
32	5,531	4,149	3,557	3,218	2,995	2,836	2,715	2,620	2,543	2,480
33	5,515	4,134	3,543	3,204	2,981	2,822	2,701	2,606	2,529	2,466
34	5,499	4,120	3,529	3,191	2,968	2,808	2,688	2,593	2,516	2,453
35	5,485	4,106	3,517	3,179	2,956	2,796	2,676	2,581	2,504	2,440
36	5,471	4,094	3,505	3,167	2,944	2,785	2,664	2,569	2,492	2,429
37	5,458	4,082	3,493	3,156	2,933	2,774	2,653	2,558	2,481	2,418
38	5,446	4,071	3,483	3,145	2,923	2,763	2,643	2,548	2,471	2,407

39	5,435	4,061	3,473	3,135	2,913	2,754	2,633	2,538	2,461	2,397
40	5,424	4,051	3,463	3,126	2,904	2,744	2,624	2,529	2,452	2,388
41	5,414	4,042	3,454	3,117	2,895	2,736	2,615	2,520	2,443	2,379
42	5,404	4,033	3,446	3,109	2,887	2,727	2,607	2,512	2,435	2,371
43	5,395	4,024	3,438	3,101	2,879	2,719	2,599	2,504	2,427	2,363
44	5,386	4,016	3,430	3,093	2,871	2,712	2,591	2,496	2,419	2,355
45	5,377	4,009	3,422	3,086	2,864	2,705	2,584	2,489	2,412	2,348
df untuk penyebut	df untuk Pembilang									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	5,369	4,001	3,415	3,079	2,857	2,698	2,577	2,482	2,405	2,341
47	5,361	3,994	3,409	3,073	2,851	2,691	2,571	2,476	2,399	2,335
48	5,354	3,987	3,402	3,066	2,844	2,685	2,565	2,470	2,393	2,329
49	5,347	3,981	3,396	3,060	2,838	2,679	2,559	2,464	2,387	2,323
50	5,340	3,975	3,390	3,054	2,833	2,674	2,553	2,458	2,381	2,317
51	5,334	3,969	3,385	3,049	2,827	2,668	2,547	2,452	2,375	2,311
52	5,328	3,963	3,379	3,044	2,822	2,663	2,542	2,447	2,370	2,306
53	5,322	3,958	3,374	3,038	2,817	2,658	2,537	2,442	2,365	2,301
54	5,316	3,953	3,369	3,034	2,812	2,653	2,532	2,437	2,360	2,296
55	5,310	3,948	3,364	3,029	2,807	2,648	2,528	2,433	2,355	2,291
56	5,305	3,943	3,359	3,024	2,803	2,644	2,523	2,428	2,351	2,287
57	5,300	3,938	3,355	3,020	2,798	2,639	2,519	2,424	2,347	2,282
58	5,295	3,934	3,351	3,016	2,794	2,635	2,515	2,420	2,342	2,278
59	5,290	3,929	3,347	3,012	2,790	2,631	2,511	2,416	2,338	2,274
60	5,286	3,925	3,343	3,008	2,786	2,627	2,507	2,412	2,334	2,270
61	5,281	3,921	3,339	3,004	2,783	2,624	2,503	2,408	2,331	2,266
62	5,277	3,917	3,335	3,000	2,779	2,620	2,499	2,404	2,327	2,263
63	5,273	3,914	3,331	2,997	2,775	2,616	2,496	2,401	2,323	2,259
64	5,269	3,910	3,328	2,993	2,772	2,613	2,493	2,397	2,320	2,256
65	5,265	3,906	3,324	2,990	2,769	2,610	2,489	2,394	2,317	2,252
66	5,261	3,903	3,321	2,987	2,766	2,607	2,486	2,391	2,314	2,249
67	5,257	3,900	3,318	2,984	2,762	2,604	2,483	2,388	2,310	2,246
68	5,254	3,896	3,315	2,981	2,759	2,601	2,480	2,385	2,307	2,243
69	5,250	3,893	3,312	2,978	2,757	2,598	2,477	2,382	2,305	2,240
70	5,247	3,890	3,309	2,975	2,754	2,595	2,474	2,379	2,302	2,237
71	5,244	3,887	3,306	2,972	2,751	2,592	2,472	2,376	2,299	2,235
72	5,241	3,885	3,303	2,969	2,748	2,589	2,469	2,374	2,296	2,232
73	5,238	3,882	3,301	2,967	2,746	2,587	2,466	2,371	2,294	2,229
74	5,235	3,879	3,298	2,964	2,743	2,584	2,464	2,369	2,291	2,227
75	5,232	3,876	3,296	2,962	2,741	2,582	2,461	2,366	2,289	2,224
76	5,229	3,874	3,293	2,959	2,738	2,580	2,459	2,364	2,286	2,222
77	5,226	3,871	3,291	2,957	2,736	2,577	2,457	2,362	2,284	2,220
78	5,223	3,869	3,289	2,955	2,734	2,575	2,454	2,359	2,282	2,217
79	5,221	3,867	3,286	2,953	2,732	2,573	2,452	2,357	2,280	2,215
80	5,218	3,864	3,284	2,950	2,730	2,571	2,450	2,355	2,277	2,213
81	5,216	3,862	3,282	2,948	2,727	2,569	2,448	2,353	2,275	2,211
82	5,213	3,860	3,280	2,946	2,725	2,567	2,446	2,351	2,273	2,209
83	5,211	3,858	3,278	2,944	2,723	2,565	2,444	2,349	2,271	2,207
84	5,209	3,856	3,276	2,942	2,722	2,563	2,442	2,347	2,269	2,205
85	5,207	3,854	3,274	2,940	2,720	2,561	2,440	2,345	2,268	2,203
86	5,204	3,852	3,272	2,939	2,718	2,559	2,438	2,343	2,266	2,201
87	5,202	3,850	3,270	2,937	2,716	2,557	2,437	2,341	2,264	2,199
88	5,200	3,848	3,268	2,935	2,714	2,556	2,435	2,340	2,262	2,198

89	5,198	3,846	3,267	2,933	2,713	2,554	2,433	2,338	2,260	2,196
90	5,196	3,844	3,265	2,932	2,711	2,552	2,432	2,336	2,259	2,194
91	5,194	3,843	3,263	2,930	2,709	2,551	2,430	2,335	2,257	2,193
92	5,192	3,841	3,262	2,928	2,708	2,549	2,428	2,333	2,256	2,191
93	5,191	3,839	3,260	2,927	2,706	2,547	2,427	2,332	2,254	2,189
df untuk penyebut	df untuk Pembilang									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	5,189	3,838	3,258	2,925	2,705	2,546	2,425	2,330	2,252	2,188
95	5,187	3,836	3,257	2,924	2,703	2,544	2,424	2,328	2,251	2,186
96	5,185	3,834	3,255	2,922	2,702	2,543	2,422	2,327	2,249	2,185
97	5,183	3,833	3,254	2,921	2,700	2,542	2,421	2,326	2,248	2,183
98	5,182	3,831	3,252	2,919	2,699	2,540	2,420	2,324	2,247	2,182
99	5,180	3,830	3,251	2,918	2,697	2,539	2,418	2,323	2,245	2,181
100	5,179	3,828	3,250	2,917	2,696	2,537	2,417	2,321	2,244	2,179
∞	5,039	3,703	3,129	2,799	2,579	2,421	2,300	2,204	2,126	2,061